





PEMERINTAH KOTA TANGERANG RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA TANGERANG TAHUN 2020

Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 69 ayat (1), dan merupakan amanat dari pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 merupakan perwujudan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kota Tangerang selama tahun anggaran 2020. dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 yang disampaikan secara transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2020, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan atau saran atas penyelenggaran pemerintahan daerah dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan datang.





Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa muatan RLPPD adalah sebagai berikut:

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang, pemerintah pusat, swasta dan pihak –pihak lain dalam pembangunan nasional. Sebagai gambaran perkembangan indikator kinerja makro tahun 2019-2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Indikator Kinerja Makro Kota Tangerang
Tahun 2019-2020

No	Kineria Tahun		Capaian Kinerja Tahun 2020	Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia	78,43 poin	78,25 poin	-0,18
2.	Angka Kemiskinan	4,43 persen	5,22 persen	0,79
3.	Angka Pengangguran	7,13 persen	8,63 persen	1,5
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,05 persen	-6,92 persen	-10,97
5.	Pendapatan Per Kapita	77.162.796	63.262.774	-13.900.022
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,328 poin	0,339 poin	0,019

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2021

a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat merupakan program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan misi pembangunan daerah Kota Tangerang. Melalui pembangunan bidang ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas





sumber daya manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat harus dapat diwujudkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Komponen IPM Kota Tangerang Tahun 2018 - 2020

Komponen IPM Kota Tangerang	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,45	71,57	71,60
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,83	13,84	13,85
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,51	10,65	10,69
Pengeluaran (Ribu Rupiah)	14.443	14.860	14.484
Indeks Harapan Hidup	79,15	79,34	79,38
Indeks Pengetahuan	73,45	73,94	74,11
Indeks Pengeluaran	81,37	82,24	81,46
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,92	78,43	78,25

Sumber: BPS Kota Tangerang (data diolah)

Sementara angka IPM Kota Tangerang dibandingkan dengan angka IPM nasional dan Provinsi Banten dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3. IPM Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional
Tahun 2016-2020

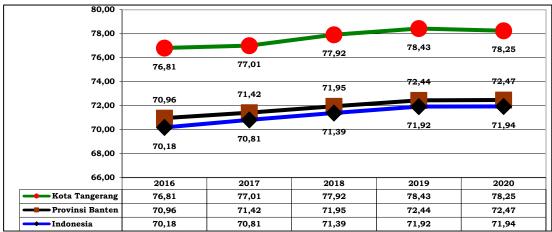
Tahun	Nilai IPM								
Tanun	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional						
2016	76,81	70,96	70,18						
2017	77,02	71,42	70,81						
2018	77,92	71,95	71,37						
2019	78,43	72,44	71,92						
2020	78,25	72,47	71,94						

Sumber: BPS (data diolah)





Gambar 1 Perkembangan IPM Kota Tangerang, Nasional dan Provinsi Banten Tahun 2016-2020



Sumber: BPS (data diolah)

Perkembangan IPM Kota Tangerang mengalami penurunan dengan Laju pertumbuhan negatif sebesar -0,23 poin. Meskipun mengalami penurunan tetapi nilai IPM masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional dan Provinsi Banten .

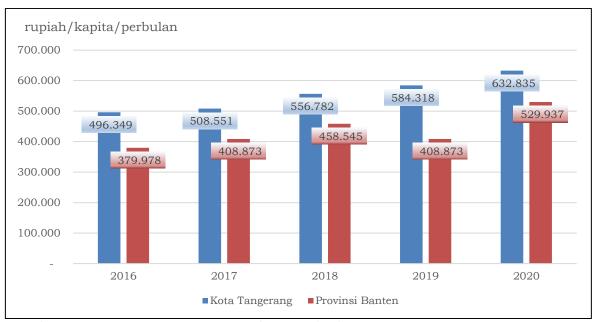
b. Angka Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di manapun, termasuk Indonesia. Masalah mendasar (kemiskinan) tidak hanya menyangkut jumlah/persentase atau identifikasi penduduk miskin yang layak mendapat bantuan saja, juga menyangkut masalah definisi kemiskinan itu sendiri. Perbedaan definisi ini akan mengakibatkan perbedaan dalam mengukur tingkat kemiskinan dan perbedaan dalam persepsi atas hasil dan implementasinya.





Gambar 2
Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tangerang dan Provinsi Banten
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Tangerang dan Provinsi Banten

Garis Kemiskinan Kota Tangerang diatas rata-rata garis kemiskinan di Provinsi Banten, bahkan yang tertinggi se Provinsi Banten. Tingginya Garis Kemiskinan Kota Tangerang dikarenakan tingginya harga komoditi makanan, bukan makanan dan tingkat kebutuhan seperti perumahan, listrik, bensin, pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya berimbas pada konsumsi masyarakat kelompok marginal di Kota Tangerang.

Tabel 4
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kota Tangerang Tahun 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	
2016	496.349	102.880	4,94	
2017	508.551	105.340	4,95	
2018	556.782	103.490	4,76	
2019	584.318	98.370	4,43	
2020	632.835	118.220	5,22	

Sumber: BPS Kota Tangerang dan Provinsi Banten

Tabel diatas menunjukkan perkembangan jumlah dan persentase Penduduk miskin Kota Tangerang dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 berfluktuatif, dimana terjadi penurunan dan peningkatan jumlah dan persentase

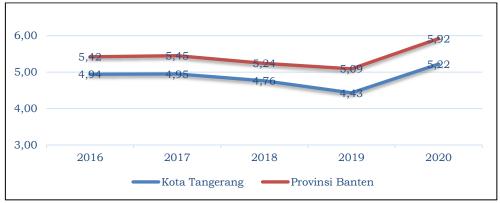




penduduk miskin di Kota Tangerang dan persentase penduduk di Tahun 2020 terjadi peningkatan penduduk miskin dikarenakan kondisi pandemi Covid-19.

Meskipun pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin meningkat seiring dengan meningkatnya nilai garis kemiskinan di Kota Tangerang namun Pemerintah Kota Tangerang telah berhasil mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Gambar 3
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Tangerang dan Provinsi Banten
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Tangerang dan Banten (diolah)

Pemerintah Kota Tangerang melalui program kesehatan gratis, pendidikan, infrastruktur dan subsidi pangan tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan bagi warga Kota Tangerang. Masyarakat dengan pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan biasanya hanya dengan sedikit goncangan masalah ekonomi mereka akan berubah menjadi miskin. Keadaan ini mengakibatkan banyak penduduk yang keluar masuk menjadi miskin.

Oleh karenanya program-program pro kemiskinan tidak hanya ditujukan untuk mereka yang berada dibawah garis kemiskinan tetapi juga masyarakat yang rentan miskin yaitu masyarakat yang dengan mudah jatuh ke bawah garis kemiskinan.

c. Angka Pengangguran

Pada Tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang sebesar 8,63%. Hal ini mengartikan bahwa diantara 100 orang yang termasuk





ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 8 hingga 9 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jika dibandingkan dalam 5 tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tangerang cenderung stabil dikisaran 7 sampai dengan 8 %.

Tabel 5
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang dan Kabupaten/Kota
Lainnya di Provinsi Banten Tahun 2018-2020

Voh /Voto	Terbuka (TPT)							
Kab/Kota	Agustus-2018	Agustus-2019	Agustus-2020					
Kab. Pandeglang	8,33	8,71	9,15					
Kab. Lebak	7,69	8,05	9,63					
Kab. Tangerang	9,7	8,91	13,06					
Kab. Serang	12,77	10,65	12,22					
Kota Tangerang	7,4	7,13	8,63					
Kota Cilegon	9,33	9,68	12,69					
Kota Serang	8,16	8,08	9,26					
Kota Tangsel	4,67	4,79	8,48					
Banten	8,52	8,11	10,64					

Sumber: BPS Provinsi Banten

Tingkat Penganguran terbuka di Kota Tangerang Tahun 2020 terjadi peningkatan 1,5% sebagaimana Kota dan Kabupaten lain di Provinsi Banten juga meningkat, jika dibandingkan dengan daerah perkotaan di Provinsi Banten, Kota Tangerang menempati terendah kedua setelah Kota Tangerang Selatan.

Hal ini terjadi diakibatkan dampak Pandemic Covid-19 pada sektor ketenagakerjaan, seperti banyaknya perusahaan yang melakukan efisiensi dengan melakukan PHK dan merumahkan karyawan serta angkatan kerja mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1.108.057 orang pada Tahun 2019 menjadi sebanyak 1.127.599 orang pada Tahun 2020 (meningkat sebanyak 19.542 orang) dengan didominasi lulusan SMA sederajat.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2020, Pandemi *Covid-19* telah menyebabkan menurunnya perekonomian dan aktivitas di berbagai sektor dan wilayah Indonesia termasuk Kota Tangerang. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang pada tahun 2020 turun mencapai -6,92 persen. Pertumbuhan ekonomi ini mengalami nilai negatif cukup signifikan. Apabila dilihat dari laju





pertumbuhan menurut lapangan usahanya, lapangan usaha transportasi dan pergudangan menjadi indikasi penyebab terjadinya nilai pertumbuhan negatif. Dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial berskala Besar dalam menghadapi pandemi *Covid-19* terutama pembatasan terhadap penggunaan transportasi laju pertumbuhan di lapangan usaha tersebut mengalami penurunan hingga nilai negatif sebesar -45,72 persen.

Selama lima tahun terakhir lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 31,05 persen terhadap Total PDRB Kota Tangerang. Lapangan usaha Transpotasi dan Pergudangan mencakup Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkatan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Angkutan Udara, Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan kurir. Sub lapangan usaha Angkutan Udara dengan adanya Bandara Soeta memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB Kota Tangerang yaitu sebesar 26,79 persen. Dengan memiliki kontribusi yang besar ini maka berdampak sangat signifikan terhadap kontribusi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang.

Penurunan dari laju pertumbuhan di sub lapangan usaha Angkutan Udara merupakan dampak dari naiknya harga tiket pesawat dan keputusan terkait bagasi berbayar dari maskapai penerbangan ditambah dengan pembatasan penumpang.

Tabel 6
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten
dan Nasional Tahun 2016-2020

		LPE (%)	
Tahun	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2016	5,34	5,28	5,03
2017	5,88	5,75	5,07
2018	4,95	5,77	5,17
2019	4,05	5,29	5,02
2020	-6,92	-3,38	-2,07

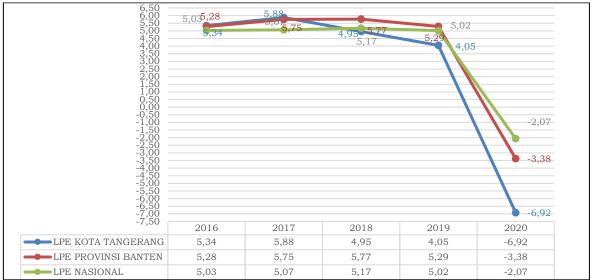
Sumber: BPS Kota Tangerang, Banten dan Nasional

Keterangan: Tahun 2018 angka revisi, Tahun 2019 angka sementara, Tahun 2020 angka sangat sementara.





Gambar 4
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi
Banten dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Tangerang, Banten dan Nasional

Keterangan: Tahun 2018 angka revisi, Tahun 2019 angka sementara, Tahun 2020 angka sangat sementara

Selama periode 2016-2017, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang meningkat terus. Namun pada Tahun 2018-2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang mengalami penurunan yang sangat signifikan bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional.

Secara umum, pada periode 2016-2017 pertumbuhan ekonominya cukup stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun nasional. Pada Tahun 2018-2019, di tengah masih melemahnya global nasional, Kota perekonomian dan Tangerang tetap mempertahankan LPE-nya di atas 4%. Akan tetapi pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang menurun hingga nilai negatif leibh rendah dibanding penurunan Provinsi Banten dan Nasional sejalan dengan menurunnya pertumbuhan sektor lapangan usaha transportasi pergudangan sebagai sektor yang memberikan distribusi PDRB terbesar ke Tiga di Kota Tangerang turun hingga nilai negatif sebesar -28,69. Lapangan Usaha transportasi merupakan sektor paling berdampak dengan adanya kebijakan pembatasan untuk menghadapi Covid-19.





e. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Pendapatan per kapita untuk Kota Tangerang dihitung dengan membagi pendapatan Kota Tangerang yang dicerminkan pada PDRB Kota Tangerang dengan jumlah penduduknya umum disebut PDRB Perkapita.

PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per-jiwa atau satu orang penduduk yang dihitung berdasarkan harga pada Tahun penghitungan dengan mengesampingkan laju inflasi.

Sedangkan PDRB per kapita yang dihitung berdasarkan harga konstan menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per-kapita penduduk dengan memperhitungkan angka inflasi. Perkembangan PDRB per Kapita Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7
PDRB Perkapita Kota Tangerang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB per Kapita per Tahun	Rp.Juta/	65,04	69,63	73,84	77,16	63,26
	Jiwa/Tahun					
PDRB ADHK per Kapita per Tahun	Rp.Juta/	45,68	47,33	48,64	49,60	45,28
	Jiwa/Tahun					
Laju Pertumbuhan PDRB ADHB per	%	6,83	7,06	6,04	4,50	-18,01
Kapita per Tahun						
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK per	%	3,00	3,60	2,77	1,97	-8,71
Kapita per Tahun						
PDRB ADHB per Kapita per Bulan	Rp.Juta/	5,42	5,80	6,15	6,41	5,25
	Jiwa/Bulan					
PDRB ADHK per Kapita per Bulan	Rp.Juta/	3,81	3,94	4,05	4,12	3,76
	Jiwa/Bulan					

Sumber: BPS Kota Tangerang

Pendapatan perkapita Kota Tangerang mengalami penurunan seiring dengan Pembatasan kegiatan dalam upaya mengatasi pandemi *covid-19* terutama diakibatkan dampak menurunnya sektor transportasi di Kota Tangerang sebagai sektor yang bekontribusi cukup besar di Kota Tangerang. Di Tahun 2020 pendapatan penduduk Kota Tangerang dirata-ratakan sebesar 5,25 juta dalam sebulan berkurang sebesar 1,16 juta jika dibandingkan Tahun 2019.





f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Untuk mengukur tingkat ketimpangan dan pemerataan ekonomi digunakan Gini Ratio (GR) atau dikenal dengan istilah Indeks Gini. Indeks Gini merupakan sebagai salah satu parameter untuk menilai tingkat pemerataan hasil pembangunan melalui distribusi pendapatan. Nilai Indeks Gini terentang dari angka 0 (yang berarti merata sempurna) sampai dengan angka 1 (yang berarti tidak merata sempurna). Semakin mendekati angka 0 nilai Indeks Gini tersebut, maka semakin merata distribusi pendapatannya. Dalam periode Tahun 2016-2019 terjadi peningkatan angka Gini Ratio secara perlahan di Kota Tangerang. Perkembangan Gini Ratio Kota Tangerang Tahun 2016-2020 dapat diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 8
Nilai Gini Rasio Kota Tangerang Tahun 2016-2020

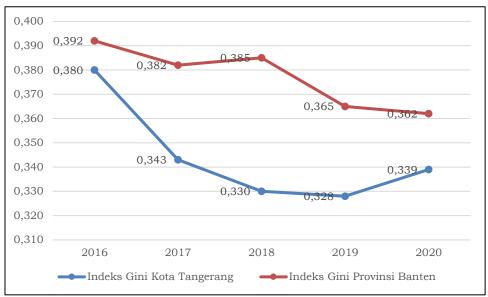
Tahun	Gini Rasio	Keterangan
2016	0,380	Ketimpangan sedang
2017	0,343	Ketimpangan sedang
2018	0,340	Ketimpangan sedang
2019	0,328	Ketimpangan sedang
2020	0,339	Ketimpangan sedang

Sumber: BPS Provinsi Banten

Indeks Gini signifikan menurun sebesar 0,052 poin selama periode 2016-2019, akan tetapi pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,011 dari Tahun 2019. Indeks Gini Kota Tangerang pada Tahun 2020 adalah 0,339 poin atau berada pada ketimpangan sedang. Capaian Indeks Gini Kota Tangerang Tahun 2020 tersebut juga mengandung arti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Tangerang pada Tahun 2020 dikategorikan sebagai tingkat "ketimpangan sedang".



Gambar 5
Perkembangan Indeks Gini Kota Tangerang dan Provinsi Banten
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Banten dan Tangerang

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang penting karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Tingginya ketimpangan pendapatan atau kemiskinan relatif, berarti kebijakan pembangunan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan capaian nilai Indeks Gini Kota Tangerang yang semakin membaik hingga Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan yang ditetapkan Pemda Kota Tangerang sejauh ini (khususnya kebijakan di bidang ekonomi) telah cukup efektif melayani seluruh lapisan masyarakat secara merata.

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Berikut dijelaskan capaian kinerja urusan pelayanan dasar dari 6 (enam) urusan yaitu Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan permukiman, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Sosial.





Tabel 9

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

Urusan Pelayanan Dasar Tahun 2020

Urusan Pemerinta han	N O IK K	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5- 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	%	38.986	58,97	Dinas Pendidikan	
			Jumlah anak usia 5- 6 tahun pada kota yang bersangkutan		66.108			
	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7- 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	%	195.722	102,63	Dinas Pendidikan	
			Jumlah anak usia 7- 12 tahun pada kota yang bersangkutan		190.705			
	3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	%	83.044	94,06	Dinas Pendidikan	
			Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan		88.291			
	4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	%	5.385	100,00	Dinas Pendidikan	
			Jumlah anak usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kota yang bersangkutan		5.385			
Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kota Jumlah Penduduk		3.287 1.834.962	0,18	Dinas Kesehatan	
	6	Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	kota Jumlah RS Rujukan kota yang terakreditasi minimal Tingkat Utama Jumlah RS kota	%	15	83,33	Dinas Kesehatan	
	7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil di kota	%	40.533	100,00	Dinas Kesehatan	





Urusan Pemerinta han	N O IK K	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	%	38.691	100,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah ibu bersalin di kota		38.691			
	9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	38.691	100,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah bayi baru lahir di kota		38.691			
	10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	89.866	94,04	Dinas Kesehatan	
			Jumlah balita di kota		95.564			
	11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	238.826	100,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah anak usia pendidikan dasar di kota		238.826			
	12	Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	449.050	100,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah orang usia 15-59 tahun di kota		449.050			
	13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	43.334	100,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kota		43.334			
	14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	124.700	100,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah penderita hipertensi di kota		124.700			
	15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	71.800	100,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah penderita DM di kota		71.800			
	16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	890	100,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah penderita ODGJ di kota		890			
	17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan	%	7.302	100,00	Dinas Kesehatan	





Urusan	N	Indikator Kinerja Kunci			E1	G		
Pemerinta han	IK	Heell	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(2)	K	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(-/		pelayanan TBC sesuai	pelayanan kesehatan	(=)	(0)	(1)	(0)	(-)
		standar	sesuai standar Jumlah penderita		7.302			
			TBC di kota		7.302			
	18	Persentase orang dengan	Jumlah orang	%	31.417	100,00	Dinas	
		resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan	dengan resiko terinfeksi HIV yang				Kesehatan	
		mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	mendapatkan					
		standar	pelayanan deteksi dini HIV sesuai					
			standar					
			Jumlah orang		31.417			
			dengan resiko terinfeksi HIV di					
			kota					
3		Rasio luas kawasan	Luas kawasan	%	0	0,00	Dinas	
Umum dan Penataan		pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh	permukiman rawan banjir yang				Pekerjaan Umum dan	
Ruang		infrastruktur pengendalian	terlindungi oleh				Omum dan Penataan	
		banjir	infrastruktur pengendalian banjir				Ruang	
			di Wilayah Sungai					
			(WS) Kewenangan kota (ha)					
			Luas kawasan		1			
			permukiman rawan					
			banjir di WS Kewenangan kota					
			(ha)					
	20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang	Luas kawasan permukiman	%	0	0,00	Dinas Pekerjaan	
		pantai rawan abrasi, erosi,	sepanjang pantai				Umum dan	
		dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur	rawan abrasi yang				Penataan	
		pengaman pantai di WS	terlindungi oleh infrastruktur				Ruang	
		Kewenangan kota	pengaman pantai di					
			Wilayah Sungai (WS) Kewenangan					
			kota (ha)					
			Luas kawasan permukiman		1			
			sepanjang pantai					
			rawan abrasi di WS					
			Kewenangan kota (ha)					
	21	Persentase luas daerah	Luas irigasi	%	0	0,00	Dinas	
		irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan	kewenangan kota yang dilayani oleh				Pekerjaan Umum dan	
		irigasi	jaringan irigasi yang				Penataan	
			dibangun (ha), ditingkatkan (ha),				Ruang	
			direhabilitasi (ha),					
			dioperasi dan					
			pelihara (ha) di tahun eksisting					
			Luas daerah irigasi		1			
	22	Persentase jumlah rumah	kewenangan kota Jumlah kumulatif	%	490.484	83,34	Dinas	
		tangga yang mendapatkan	masyarakat yang	/0	770.707	05,54	Perumahan,	
		akses terhadap air minum	rumah tangga yang				Permukiman	
		melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan	mendapatkan akses terhadap air minum				dan Pertanahan	
		jaringan perpipaan	melalui SPAM					
		terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	jaringan perpipaan dan bukan jaringan					
		J6.: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	perpipaan					





Urusan	N	Indikator Kinerja Kunci			T	G .		
Pemerinta	O IK	Hasil	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
han	K	(Outcome)	(4)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(5)		(0)	(0)
(2)		(3)	(4) terlindungi di dalam	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			sebuah kota.					
			Jumlah total rumah		588.566			
			tangga di seluruh kota tersebut.					
	23	Persentase jumlah rumah	Jumlah rumah yang	%	423.378	99,70	Dinas	
		yang memperoleh layanan	memiliki akses				Perumahan,	
		pengolahan air limbah domestik	pengolahan berupa cubluk + jumlah				Permukiman dan	
			rumah yang lumpur				Pertanahan	
			tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah					
			rumah yang					
			memiliki					
			sambungan rumah dan air limbahnya					
			diolah di IPALD					
			Jumlah rumah di		424.633			
	24	Rasio kepatuhan IMB kab/	kota Jumlah pemanfaatan	%	43.338	100,00	Dinas	
	2-7	kota	IMB yang sesuai	70	43.330	100,00	Penanaman	
			peruntukannya				Modal dan	
			Jumlah IMB yang berlaku		43.338		PTSP	
	25	Rasio kemantapan jalan	Panjang jalan	%	245.946	96,33	Dinas	
			kewenangan kota				Pekerjaan	
			yang mantap Panjang jalan		255.318		Umum dan Penataan	
			keseluruhan di		200.010		Ruang	
	26	D i - 4 1i -	wilayah kota	0/	140	02.71	D:	
	20	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang	%	149	93,71	Dinas Perumahan,	
		wilayah kota yang	terlatih di wilayah				Permukiman	
		dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	kota yang dibuktikan dengan				dan Pertanahan	
		sertifikat pelatifian ann	sertifikat pelatihan				1 Citananan	
			ahli		150			
			Jumlah kebutuhan tenaga ahli di		159			
			wilayah kota					
	27	Rasio proyek yang menjadi		%	605	100	Dinas Perumahan,	
		kewenangan pengawasannya tanpa	menjadi kewenangan				Permukiman	
		kecelakaan konstruksi	pengawasannya				dan	
			tanpa kecelakaan kontruksi				Pertanahan	
			Jumlah total proyek		605			
			yang menjadi					
			kewenangan pengawasannya					
	28	Penyediaan dan rehabilitasi	Jumlah unit rumah	%	0	0,00	Dinas	
Rakyat		rumah layak huni bagi korban bencana kota	korban bencana				Perumahan, Permukiman	
dan Kawasan		когдан депсана кога	yang ditangani pada tahun 2020				Permukiman dan	
Permukim			Jumlah total rencana		1		Pertanahan	
an			unit rumah korban bencana yang akan					
			ditangani pada					
			tahun 2020					
	29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi	%	0	0,00	Dinas Perumahan,	
		masyarakat terdampak	Penggantian Hak				Permukiman	
		relokasi program	Atas Penguasaan				dan	
		pemerintah kota	Tanah dan/atau Bangunan + Rumah				Pertanahan	
			Tangga Penerima					
			Subsidi Uang Sewa					





Urusan	N	Indikator Kinerja Kunci						
Pemerinta han	O IK K	Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(2)	17	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			+ Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni					
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		1			
	30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani Luas kawasan	%	311,37 339,87	91,61	Dinas Perumahan, Permukiman dan	
		yang unangam	kumuh dibawah 10 Ha		339,87		Pertanahan	
	31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh/tidak layak huni	%	3.066	0,72	Dinas Perumahan, Permukiman	
			Jumlah total unit rumah kota		424.633		dan Pertanahan	
	32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	%	248.304	100,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan	
			Jumlah unit rumah kab/kota		248.304		Pertanahan	
Ketentram an, Ketertiban Umum dan		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan Jumlah pengaduan pelanggaran yang	%	1.318	100,00	Satpol PP	
Perlindung an		Persentase Perda dan	masuk Jumlah	%	6	100,00	Satpol PP	
Masyaraka t		Perkada yang ditegakkan	Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan					
			Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		6			
	35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Orang	101.723	101.723	BPBD	
	36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Orang	101.723	101.723	BPBD	
	37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Orang	101.939	101.939	BPBD	
	38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman,penyela matan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat	%	175	100,00	ВРВО	





Urusan Pemerinta han	N O IK K	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah					
			Jumlah kejadian		175			
			kebakaran di kota					
	39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		Menit	14,10	14,10	BPBD	
Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Populasi penyandang	%	13.100	100,00	Dinas Sosial	
			disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis					
	41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	%	1.650	100,00	Dinas Sosial	
			Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota		1.650			





Tabel 10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Output*) Urusan Pelayanan Dasar Tahun 2020

	T T	NO	Indikator Kinerja Kunci						
No	Urusan Pemerintah		Keluaran	Rumus	Satuan	Elemen	Capaian	Sumber Data	Keterangan
	an	K	(Output)		~~~~	data	Kinerja		g
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		PE I	NDIDIKAN PAUD Jumlah Satuan Pendidikan		T T : 4	256	256	Dinas	
	n	1	Anak Usia Dini		Unit	256	230	Dinas Pendidikan	
			Terakreditasi (Negeri dan					Tendidikan	
			Swasta)						
		2	Jumlah peserta didik		Orang	0	0	Dinas	
			PAUD (Negeri dan					Pendidikan	
			Swasta) yang menerima perlengkapan dasar						
			peserta didik dari						
			Pemerintah Daerah						
		3	Jumlah peserta didik		Orang	0	0	Dinas	
			PAUD (Negeri dan					Pendidikan	
			Swasta) yang menerima pembebasan biaya						
			pendidikan						
		4	Jumlah kebutuhan		Orang	3.414	3.414	Dinas	
			minimal pendidik PAUD					Pendidikan	
		-	(Negeri dan Swasta)		0	2.414	2.414	D:	
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan		Orang	3.414	3.414	Dinas Pendidikan	
			Swasta)					Tendidikan	
		6	Jumlah pendidik PAUD		Orang	1.971	1.971	Dinas	
			(Negeri dan Swasta) yang					Pendidikan	
			memiliki ijazah diploma						
			empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan						
			anak usia dini,						
			kependidikan lain atau						
			psikologi dan sertifikat						
			profesi guru pendidikan						
		7	anak usia dini Jumlah kepala sekolah		Orang	538	538	Dinas	
		,	PAUD (Negeri dan		Orang	336	336	Pendidikan	
			Swasta) yang memiliki						
			ijazah D-IV atau S1,						
			sertifikat pendidik dan						
			surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
			calon kepala sekolah						
			untuk PAUD formal atau						
			sertifikat pendidikan dan						
			pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari						
1			lembaga pemerintah						
		PE	NDIDIKAN DASAR						
		1	Jumlah SD dan SMP		Unit	667	667	Dinas	
1		2	Negeri Terakreditasi		0	6.072	6.072	Pendidikan Dinas	
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar		Orang	6.073	6.073	Dınas Pendidikan	
			(Negeri dan Swasta) yang					1 Chalaikan	
			menerima perlengkapan						
1			dasar peserta didik dari						
<u> </u>		_	Pemerintah Daerah		0	2.050	2.050	D.	
1		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah		Orang	3.050	3.050	Dinas Pendidikan	
			pertama (Negeri dan					1 chalaikail	
1			Swasta) yang menerima						
1			perlengkapan dasar						
			peserta didik dari						
			Pemerintah Daerah]]]		





According Acco				Indikator Kinerja Kunci			Elemen	Capaian		
(1) (2) 4	No			Keluaran (Output)	Rumus	Satuan			Sumber Data	Keterangan
4 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembehsana hisup pendidikan Sumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertuma (Negeri dan Swasta) yang menerima pembehsana biaya pembehsana pertama (Negeri dan Swasta) pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) pembehsana pembehsana biaya biaya pembehsana biaya biaya pembehsana biaya b	(1)		17	\ I /	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(Negeri dan Swasta) yang menerima pendidikan bisya pendidikan pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan bisya pendidikan pendigikan penginga sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan bisya pendidikan pendidikan pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 7 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 8 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 10 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 11 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah mengah pertama (Negeri dan Swasta) 12 Jumlah kebutuhan Orang 671 671 Dinas Pendidikan Pendidikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 11 Jumlah kebutuhan Orang 671 671 Dinas Pendidikan Pendidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah mengah pertama (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah mengah pertama (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah mengah pertama (Negeri dan Swasta) 15 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah mengah pertama (Negeri dan Swasta) 16 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah mengah pertama (Negeri dan Swasta) 17 Jumlah kebutuhan mengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jazah diploma empat (D-U) yatau sarjana (S1) dan setrifikat pendidikan setolah mengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jazah diploma empat (D-U) yatau sarjana (S1) dan setrifikat pendidikan setolah mengah pendidik pada jenjang sekolah mengah pendidik pada jenjang sekolah mengah pendidik pada jenjang sekolah mengah pendidikan setolah pada jenjang sekolah mengah pendidik pada jenjang sekolah mengah pendidik pada jenjang sekolah mengah pendidik pada jenjang sekolah pada jenjang sekolah pendidik pada pendiga pendidikan sekolah pada jenjang sekolah pendidik pada pendiga pendidik pada pendidikan sekolah pada jenjang sekolah pendidik pada pend		Ì	4		` ,		154.056	154.056		, ,
menerima pembebasan biaya pendidikan pertama (Negeri dan Swasta) pertama (Negeri dan Swasta) pertama (Negeri dan Swasta) pendidikan pe									Pendidikan	
Sumulan pesera didik pada pentama (Negeri dan Nasata) yang menerima pendidikan pendidika										
Samalan peserta didik pada pertama (Negeri dan Swastan) Pendidikan										
pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pembelasan biaya pendidikan di pendidikan pendidik pada pendidikan di pendidikan pendidikan di pendidikan pendidikan pendidikan pertama (Negeri dan Swasta) 10 Jumlah kebutahan di pertama (Negeri dan Swasta) 11 Jumlah kebutahan di pendidikan pada jenjang sekolah disare (Negeri dan Swasta) 12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah disare (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah disare (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah kebutahan di pendidikan pada jenjang sekolah disare (Negeri dan Swasta) 15 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 16 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah disare (Negeri dan Swasta) 17 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah disare (Negeri dan Swasta) 18 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah disare (Negeri dan Swasta) 19 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah disare (Negeri dan Swasta) 10 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah disare (Negeri dan Swasta) yang memiliki jizara diploma empat (D-IV) atau sarjana (S) dan sertifikat pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jizarah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S) dan sertifikat pendidikan pada jenjang sekolah pada pendidikan pada jenjang pendidikan pada pendid			5			Orang	54.558	54.558	Dinas	
Swasta) yang menerima pembehasan biaya pendidikan G Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) T Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) T Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) T Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) T Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) T Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) T Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) T Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) T Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) T Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) T Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) T Jumlah keptuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) T Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) T Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) T Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) T Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) T Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) T Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) T Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) T Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) T Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) T Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) T Jumlah pendidik pada jenjang sekolah pendidik pada jenjang sekolah pendidik pada jenjang sekolah pendidik pada jenjang sekolah pendidik pada j									Pendidikan	
pembebasan biaya pendidikan di pendidikan di										
Demdidikan Dimak bebutuhan Dimak pendidikan Dimak pendidikan										
minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 7 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 8 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 9 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 10 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 11 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 12 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 15 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 16 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 17 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 18 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 19 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 19 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigarah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik jugad hejpinan sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigarah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidikan badasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigarah diploma sekolah pada jenjang sekolah pada jenjang sekolah pada jenjang sekolah pendaj sekolah pada jenjang sekolah pendaj sekolah pada jenjang sekolah pendaj sekolah pendaj sekolah pendaj sekolah pada jenjang sekolah pendaj sekolah pada jenjang sekolah pendaj sekolah pendaj seko				11 -						
ienjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)			6			Orang	8.430	8.430		
Orang 4.062 Dinas									Pendidikan	
7 Jurulah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 8 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 10 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 10 Jurulah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 11 Jurulah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 12 Jurulah keputuhan mengah pertama (Negeri dan Swasta) 13 Jurulah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 14 Jurulah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 13 Jurulah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 14 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 15 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 16 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 17 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 18 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 19 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 19 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 18 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 19 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 19 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 19 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 19 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah pendidik pada jenjang sekolah pendidik pada jenjang sekolah pendidik pada pertama (Negeri dan Swasta) 19 Jurulah pendidik pada pen										
minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 8 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 9 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 10 Jurulah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 11 Jurulah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 12 Jurulah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 12 Jurulah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 12 Jurulah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 13 Jurulah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 14 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 15 Jurulah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 16 Jurulah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 17 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 18 Jurulah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jazah diploma empat (D-IV) tatu sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jazah diploma empat (D-IV) tatu sarjana (S1) dan sertifikat pendidik jugan memiliki jazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik jugan memiliki jazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik jugan memiliki jazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik jugan memiliki jazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pada jenjang sekolah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pada jenjang sekolah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pada jenjang sekolah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jazah diploma empat (D-IV) atau			7	, ,		Orang	4.062	4.062	Dinas	
pertama (Negeri dan Swasta) 8 Jumlah pendidik pada Orang 8.430 8.430 Dinas Pendidikan 9 Jumlah pendidik pada Orang 4.062 4.062 Dinas Pendidikan 10 Jumlah kebutuhan Orang 671 671 Dinas Pendidikan 10 Jumlah kebutuhan Orang 671 671 Dinas Pendidikan 11 Jumlah kebutuhan Orang 671 671 Dinas 12 Jumlah kebutuhan Orang 671 671 Dinas 13 Jumlah kepati dan Swasta) Orang 671 671 Dinas 14 Jumlah kenaga Orang 671 671 Dinas 15 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 16 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 17 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 18 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 19 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 19 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 10 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 11 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 12 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 13 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 14 Jumlah pendidik pada Orang 671 671 Dinas 15 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 16 Jumlah pendidik pada Orang 671 671 Dinas 17 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 18 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 19 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 10 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 11 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 12 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 13 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 14 Jumlah pendidik pada Orang 7.557 Dinas 15 Jumlah tenaga Orang 7.557 Dinas 16 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 17 Jumlah tenaga Orang 7.557 Dinas 18 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 19 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 19 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 10 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 11 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 12 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 13 Jumlah tenaga Orang 671 671 Dinas 14 Jumlah pendidik pada Orang 671 671 Dinas 15 Jumlah tenaga Orang 671 671 Orang 671 671 Dinas 15 Jumlah tenaga Orang 671 671 Ora			,			Orang	4.002	4.002		
Swasta Sumlah pendidik pada penjang sekolah dasar Orang 4.062 4.062 Dinas Pendidikan										
8 Jumlah pendidik padar jenjang sekolah dasar Pendidikan 9 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 10 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 11 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 15 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 16 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 17 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 18 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pada sertifikat pendidik hadas (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pada sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah diploma empat (D-IV) atau S1, sertifikat pendidik pada pendiging sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah diploma empat (D-IV) atau S1, sertifikat pendidik pada pendidik dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah diploma empat (D-IV) atau S1, sertifikat pendidik pada pendidik dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah diploma empat (D-IV) atau S1, sertifikat pendidik pendidik pendidik pada pendidik pada pendidik pada jenjang sekolah pendidik pend										
jumlah pendidikan pada pentama (Negeri dan Swasta)			0			Orong	9.420	9.420	Dinas	
Jumlah pendidik pada ejnjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)			0			Orang	0.430	0.430		
pertama (Negeri dan Swasta) 10 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 11 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 12 Jumlah tenaga (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah tenaga (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah tenaga (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah tenaga (Negeri dan Swasta) 15 Jumlah tenaga (Negeri dan Swasta) 16 Jumlah tenaga (Negeri dan Swasta) 17 Jumlah tenaga (Negeri dan Swasta) 18 Jumlah tenaga (Negeri dan Swasta) 19 Jumlah tenaga (Negeri dan Swasta) 10 Jumlah tenaga (Negeri dan Swasta) 11 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 12 Jumlah pendidik pada (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah pendidik pada (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidik pada (Negeri dan Swasta) (Negeri dan Swasta) 15 Jumlah pendidik pada (Negeri dan Swasta) (Negeri dan Swasta) 16 Jumlah pendidik pada (Negeri dan Swasta) (Negeri dan Swasta) 17 Jumlah pendidik pada (Negeri dan Swasta) (Negeri dan Swasta) 18 Jumlah pendidik pada (Negeri dan Swasta) (Negeri dan Swasta) 19 Jumlah pendidik pada (Negeri dan Swasta) (Negeri			9			Orang	4.062	4.062		
Swasta 10 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)									Pendidikan	
To Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)										
minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 11 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 16 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) Torang			10	/		Orong	671	671	Dinas	
kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 11 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 12 Jumlah tenaga (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah tenaga (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah tenaga (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah tenaga (Orang 598 598 Dinas Pendidikan Swasta) 15 Jumlah tenaga (Orang 598 598 Dinas Pendidikan pertama (Negeri dan Swasta) 16 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 17 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah (Negeri dan Swasta) 18 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI) dan sertifikat pendidik 19 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI) dan sertifikat pendidik 19 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah pada jenjang sekolah pada jenjang sekolah pada jenjang sekolah yang memiliki jiazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI) dan sertifikat pendidik 19 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda			10			Orang	0/1	0/1		
Swasta Il Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) Il Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) Il Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) Il Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) Il Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) Il Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) Il Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) Il Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) Il Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) Il Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) Il Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) Il Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) Il Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) Il Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) Il Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah pa										
11 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 16 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 16 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 17 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 18 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 19 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigzah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah pada jenjang sekolah Orang 476 476 Dinas Pendidikan dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigzah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah				sekolah dasar (Negeri dan						
minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan Swasta) yang memiliki jigazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah				/			500	F00	7.	
kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 16 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik jiazah diploma empat (O-IV) tau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik jiazah diploma empat (O-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik lijazah diploma empat (O-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik lijazah diploma empat (O-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik lijazah diploma empat (O-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik lijazah diploma empat (O-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik lijazah diploma empat (O-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik lijazah diploma empat (O-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik lijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik lijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik lar surat tanda			11			Orang	598	598		
sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah tenaga (Pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 16 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Pepri dan Swasta) 17 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 18 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 19 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda									1 Charakan	
Swasta Corang C										
12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)										
kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik jigazah diploma empat (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik jigazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik jigazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik jigazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda			12			Owoma	671	671	Dinas	
sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda			12			Orang	0/1	0/1		
13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)									1 0110101111111	
kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau S1; sertifikat pendidik dan surat tanda										
sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda			13			Orang	598	598		
pertama (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik an surat tanda									Pendidikan	
Swasta) 14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda										
jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda				Swasta)						
(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda			14			Orang	7.557	7.557		
memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda									Pendidikan	
empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda										
pendidik 15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda				empat (D-IV) atau sarjana						
15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda										
jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda			1.5			0::	2.000	2.000	D:	
pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda			15	jumian pendidik pada		Orang	5.809	5.809		
Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda									1 chaidikan	
IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda				Swasta) yang memiliki						
sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda										
16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda										
pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda			16			Orano	476	476	Dinas	
dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda			10			Jiung	1,3	17.0		
IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda				dasar (Negeri dan Swasta)						
pendidik dan surat tanda										
				-						
				tamat pendidikan dan						





No	Pemerintah	IK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	K	(Output)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)
(1)	(2)		pelatihan calon kepala	(4)	(3)	(6)	(7)	(6)	(9)
			sekolah						
		17	Jumlah kepala sekolah		Orang	224	224	Dinas	
			pada jenjang sekolah					Pendidikan	
			menengah pertama						
			(Negeri dan Swasta) yang						
			memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan						
			surat tanda tamat						
			pendidikan dan pelatihan						
			calon kepala sekolah						
		18	Jumlah tenaga penunjang		Orang	292	292	Dinas	
			lainnya pada jenjang					Pendidikan	
			sekolah dasar (Negeri dan						
			Swasta) yang memiliki						
		10	ijazah SMA/sederajat		0	1.62	1.62	Dinas	
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang		Orang	163	163	Dinas Pendidikan	
			sekolah menengah					1 ChuluiKali	
			pertama (Negeri dan						
			Swasta) yang memiliki						
			ijazah SMA/sederajat						
			NDIDIKAN MENENGAH	PERTAMA		_	_		
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		Unit	667	667	Dinas Pendidikan	
		2	Jumlah peserta didik		Orang	6.073	6.073	Dinas	
		2	jenjang sekolah dasar		Orang	0.073	0.073	Pendidikan	
			(Negeri dan Swasta) yang					rendrantan	
			menerima perlengkapan						
			dasar peserta didik dari						
			Pemerintah Daerah						
		3	Jumlah peserta didik		Orang	3.050	3.050	Dinas	
			jenjang sekolah menengah					Pendidikan	
			pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima						
			perlengkapan dasar						
			peserta didik dari						
			Pemerintah Daerah						
		4	Jumlah peserta didik pada		Orang	154.056	154.056	Dinas	
			jenjang sekolah dasar					Pendidikan	
			(Negeri dan Swasta) yang						
			menerima pembebasan biaya pendidikan						
		5	Jumlah peserta didik pada		Orang	54.558	54.558	Dinas	
		J	jenjang sekolah menengah		Orang	54.550	54.550	Pendidikan	
			pertama (Negeri dan						
			Swasta) yang menerima						
			pembebasan biaya						
			pendidikan			0.420	0.420	D.	
		6	Jumlah kebutuhan		Orang	8.430	8.430	Dinas Pandidikan	
			minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar					Pendidikan	
			(Negeri dan Swasta)						
		7	Jumlah kebutuhan		Orang	4.062	4.062	Dinas	
			minimal pendidik pada					Pendidikan	
			jenjang sekolah menengah						
			pertama (Negeri dan						
		_	Swasta)			0.12			
		8	Jumlah pendidik pada		Orang	8.430	8.430	Dinas	
		0	jenjang sekolah dasar		0	4.000	1.000	Pendidikan	
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah		Orang	4.062	4.062	Dinas Pendidikan	
			pertama (Negeri dan					rendidikan	
			Swasta)						
		10	Jumlah kebutuhan		Orang	671	671	Dinas	
		_	minimal tenaga					Pendidikan	
			kependidikan pada jenjang					<u> </u>	





Solution School		Urusan	NO	Indikator Kinerja Kunci			El	C		
Company Comp	No	Pemerintah	ΙK	Keluaran	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Sekolah disasr (Negeri dan Swasta)	(1)		K		(4)	(5)	(6)		(8)	(9)
Il Jumlah kebutuhan minimat tenaga kependidikan pada jenjang ekoloah menengah pertama (Negeri dan Swasta) I2 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang ekoloah tasar (Negeri dan Swasta) I3 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) I3 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) I4 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) I4 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) I4 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) I5 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) I5 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) I7 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) I7 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) I7 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) I7 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) I7 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) I7 Jumlah kepala sekolah peda jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) I8 Jumlah tengap penujing laimnya pada jenjang sekolah dan Swasta) I8 Jumlah tengap penujing laimnya pada jenjang sekolah dan Swasta) I8 Jumlah tengap penujing laimnya pada jenjang sekolah dan Swasta) I8 Jumlah tengap penujing laimnya pada jenjang sekolah dan Swasta) I7 Jumlah satuan pendidikan keseriama (Negeri dan Swasta) I7 Jumlah satuan pendidikan keseriama (Negeri dan Swasta) I7 Jumlah satuan pendidikan keseriama mendidikan keseriama (Negeri dan Swasta) I7 Jumlah satuan pendidikan keseriama (Negeri dan Swast	(-)	(-/		\ /	(')	(0)	(0)	(,)	(0)	(2)
minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah perama (Negeri dan Swasta) 12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 15 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah perama (Negeri dan Swasta) 16 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menuliki jigach diploma enpat (D-IV) atau sarjana (S) dan sertifikat 17 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) Negeri menuliki jigach diploma enpat (D-IV) atau sarjana Swasta) 18 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang meniliki jigach diploma enpat (D-IV) atau sarjana dasar (Negeri dan Swasta) yang meniliki jigach D-IV yatau SI, sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang meniliki jigach D-IV yatau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda tumat pendidikan dan pelatithan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang meniliki jigach D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda tumat pendidikan dan pelatithan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang meniliki jigach D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda tumat pendidikan dan pelatithan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang meniliki jigach SIA Seelerajat 19 Jumlah sepala sekolah perdidikan dan pelatithan calon kepala sekolah perdidikan dan pelatithan sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) perdidikan dan pelatithan sekolah menengah perdidikan dan pelatithan sekolah menengah perdidikan dan pendidikan Swasta) yang meniliki jigach SIA Seelerajat PENDIDIKAN KESETARAN 1 Jumlah satuan pendidikan Negeri dan Swasta) 2 Jumlah pendidikan pendidikan Negeri dan Swasta) 2 Jumlah pendidikan pendidikan Negeri dan Swasta)				·			5 00	5 00	5.	
koependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 12 Jurnah henaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 13 Jurnah henaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 14 Jurnah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 15 Jurnah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 16 Jurnah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigatah diploma empat (D-1V) atau sarjana (SJ) dan sertifikat pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigatah diploma empat (D-1V) atau sarjana (SJ) dan sertifikat pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigatah diploma empat (D-1V) atau sarjana (SJ) dan sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidik dan surat tanda tantan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigatah SMA/sederajat 19 Jumlah tengap penunjang lainwa pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigatah SMA/sederajat 19 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan pendidikan kesetaraan pendidikan kesetaraan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigatah satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang hendidikan kesetaraan (Negeri			11			Orang	598	598		
pertama (Negeri dan Swasta) 12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 16 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) ang memiliki jizah diploma empat (D-1V) atau sarjana (S1) dan serifikat pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) ang serifikat pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) ang memiliki jizah diploma empat (D-1V) atau sarjana (S1) dan serifikat pendidik and sari (Negeri dan Swasta) ang memiliki jizah diploma empat (D-1V) atau sarjana (S1) dan serifikat pendidik and sari (Negeri dan Swasta) ang memiliki jizah diploma empat (D-1V) atau sarjana (S1) dan serifikat pendidik dan surat tanda tantar pendidik dan surat tanda tantar pendidik dan surat tanda tantar pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah mengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jizah D-1V atau S1, serifikat pendidik dan surat tanda tantar pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah mengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jizah SMA/sederajat [19] Jumlah tenaga penunjung laimnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jizah SMA/sederajat [19] Jumlah tenaga penunjung laimnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jizah SMA/sederajat [19] Jumlah tenaga penunjung memiliki jizah SMA/sederajat [19] Jumlah tenaga penunjung memiliki jizah satuan pendidikan kesteranan pendidikan kesteranan pendidikan kesteranan (Negeri dan Swasta) yang memiliki jizah satuan pendidikan kesteranan (Negeri dan Swasta) yang memiliki jizah satuan pendidikan kesteranan (Negeri dan Swasta) yang memiliki jizah satuan pendidikan kesteranan (Negeri dan Swasta) yang memiliki jizah satuan pendidikan kesteran									Tendidikan	
Sousata 12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertaman (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertaman (Negeri dan Swasta) 15 Jumlah tenaga (Negeri dan Swasta) 15 Jumlah tenaga (Negeri dan Swasta) 16 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigarah diploma empat (D-IV) atau sarjana (SJ) dan sertifikat pendidik 15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertaman (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigarah diploma empat (D-IV) atau sarjana (SJ) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertaman (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigarah diploma empat (D-IV) atau sarjana (SJ) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigarah D-IV atau SI, sertifikat pendidik ana pelatihan calon kepala sekolah 17 Jumlah kepala sekolah 17 Jumlah kepala sekolah 17 Jumlah kepala sekolah 18 Jumlah tenaga pemujang memiliki jigarah D-IV atau SI, sertifikat pendidik ana pelatihan calon kepala sekolah 18 Jumlah tenaga pemujang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigarah D-IV atau SI, sertifikat pendidik ana pelatihan calon kepala sekolah 18 Jumlah tenaga pemujang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigarah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga pemujang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigarah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga pemujang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang pemujang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang pemujang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang pemujang lainnya pada jenjang sekolah pemujang lainnya pada jenjang sekolah pemujang lainnya pada jenjang sekolah pemujang lai										
Recognition Pendidikan Pe										
sscholah dasar (Negeri dan Swasta) 13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang skolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah masarjana (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 16 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 17 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 18 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 19 Jumlah kepala sekolah (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah diploma empat (Di Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D- IV atau SI, sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan keselaran pendidikan kesetaran (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederijat Ji Jimlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederijat Ji Jimlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederijat Ji Jimlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederijat Ji Jimlah tenaga penunjang Jimlah tenaga penunjang Jimlah tenaga penunjang Jimlah tenaga penunjang Jimlah s		-	12			Orang	671	671	Dinas	
Swasta 3 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 16 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah (Pat) yana sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jizarah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah Orang 476 476 Dinas Pendidikan Swasta) yang memiliki jizarah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah pada sekolah pada sekolah pada sekolah pada jenjang sekolah pada sekolah pada sekolah pada sekolah pada jenjang sekolah pada seko									Pendidikan	
Sample S										
sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 14 Iurulah pendidik pada ienjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jizzah diplorna empat (D-IV) atau sustjana (SI) dan sertifikat pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diplorna empat (D-IV) atau sustjana (SI) dan sertifikat pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI) dan sertifikat pendidik dan sertifikat pendidik dan sertifikat pendidik an surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jizazh D-IV atau SI, sertifikat pendidik an surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jizazh D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jizazh D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jizazh SIA		•	13	,		Orang	598	598	Dinas	
pertama (Negeri dan Swasta) 14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah diploma empat (D-IV) yatau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik li di Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik na surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMAsederijat III Jumlah tengap penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMAsederijat III Jumlah tengap penunjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMAsederijat III Jumlah satuan pendidikan Nestertaman (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMAsederijat III Jumlah satuan pendidikan Nestertaman (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMAsederijat III Jumlah satuan pendidikan Nestertaman (Negeri dan Swasta) yang Memiliki jiazah SMAsederijat III Jumlah kesetaranan (Negeri dan Swasta) yang Memiliki Jumlah kesetara									Pendidikan	
Swasta) 14 Jurnlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah ofiploma empa (D-IV) atau sarjana (SI) dan sertifikat pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah diploma empa (D-IV) atau sarjana (SI) dan sertifikat pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI) dan sertifikat pendidik dan surat tanda dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah gala jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SIAM-sederajat										
ienjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pada ienjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pada ienjang sekolah menengah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SI-Watau SI-Sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SI-Watau SI-Sertifikat pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pendidikan dan pelatihan katauat pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan katauat pendidikan dan pelatihan katauat pendidikan dan pelatihan katauat pendidikan dan pelatihan katauat pendidikan sesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat Pendidikan (Negeri dan Swasta) yang				Swasta)						
(Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pendidik pendidik pendidik pendidik pendidik pendidik pendidik pendidik jiazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan Swasta) yang memiliki jiazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik an sertifikat pendidik an sertifikat pendidik an sertifikat pendidik an surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pad			14			Orang	7.557	7.557		
memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pendidik pendidik pendidik pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik pada jenjang sekolah mengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidik andan surat tanda tamat pendidik andan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah sekolah menengah sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat Pendidikan Nesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat Pendidikan Nesetaraan (Negeri dan Swasta) yang SMA Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat Pendidikan Nesetaraan (Negeri dan Swasta) yang SMA Swasta) yang Maribikan				jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang					Pendidikan	
St J dan sertifikat pendidik 15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh D- IV atau S1, sertifikat pendidik an pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh D- IV atau S1, sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh SNA/sederajat 19 Jumlah tengap penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh SNA/sederajat 19 Jumlah tengap penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh SNA/sederajat 19 Jumlah tengap penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh SNA/sederajat 19 Jumlah tengap penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh SNA/sederajat 19 Jumlah tengap penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan (Negeri dan Swasta) 3 Jumlah peserta didik pend										
pendidik 15 Jumlah pendidik pada perjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (SI) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D- IV atau SI, sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D- IV atau SI, sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D- IV atau SI, sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 18 Jumlah tengap penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 19 Jumlah tengap penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 19 Jumlah tengap penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 19 Jumlah tengap penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 19 Jumlah pada jenjang sekolah matengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 19 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki pendidikan (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan (Ne										
15 Jumlah pendidik pada ejnjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh D- IV atau S1, sertifikat pendidik an upelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh SIA/sederajat 18 Jumlah tengap penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh SIA/sederajat 19 Jumlah tengap penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh SIA/sederajat 19 Jumlah tengap penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh SIA/sederajat 19 Jumlah tengap penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh SIA/sederajat 19 Jumlah tengap penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh SIA/sederajat 19 Jumlah tengap penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jigazh SIA/sederajat 2 Jumlah sutam pendidikan Orang 8 8 Dinas Pendidikan 2 Jumlah peserta didik Orang 0 0 Dinas Pendidikan Pendidikan (Negeri dan Swasta) yang				` /						
pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Shatsat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-I IV atau SI, sertifikat pendidik 17 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-I IV atau SI, sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau SI, sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Shat Sederajat 18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang Jainnya pada jenjang sekolah D-IV atau SI, sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang Jainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat PENDIJKAN KESETARAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan (Negeri dan Swasta) yang		•	15			Orang	3.809	3.809	Dinas	
Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI) dan sertifikat pendidik 16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat PENDIKAN KESETARAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang									Pendidikan	
ijazah diploma empat (O-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16										
Sertifikat pendidik										
Dimala kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D- IV atau SI, sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau SI, sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau SI, sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah las urat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat pertama (Negeri dan Swasta) Orang 8 8 Dinas Pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) Orang 0 0 Dinas Pendidikan (Negeri dan Swasta) Pendidikan (Negeri dan Swasta) Pendidikan (Negeri dan Swasta)										
pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau SI, sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau SI, sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau SI, sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat IJ Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat IJ Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jijazah SMA/sederajat IJ Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jijazah SMA/sederajat IJ Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) Z Jumlah peserta didik Drang Dra			16	Sertifikat pendidik		Orang	476	476	Dinas	
yang memiliki jiazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 17 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah D-IV atau S1, sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki jiazah SMA/sederajat PENDIDIKAN KESETARAAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)			10			Orang	470	470		
IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 17 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat PENDIDIKAN KESETARAAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang										
pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 17 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau SI, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat PENDIDIKAN KESETARAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang										
pelatihan calon kepala sekolah Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah I8 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat I9 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat PENDIDIKAN KESETARAAN I Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah perta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) Orang 8 B Dinas Pendidikan Pendidikan Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Pendidikan Orang Pendidikan Orang Pendidikan Orang Oran				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Sekolah										
17 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat PENDIDIKAN KESETARAAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang 224										
pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat PENDIDIKAN KESETARAAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ipendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang			17			Orang	224	224	Dinas	
(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat PENDIDIKAN KESETARAAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang				pada jenjang sekolah					Pendidikan	
memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat PENDIDIKAN KESETARAAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang Pendidikan (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang				<i>U</i> 1						
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat PENDIDIKAN KESETARAAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang										
pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat PENDIDIKAN KESETARAAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang				· 1						
calon kepala sekolah 18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat PENDIDIKAN KESETARAAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang										
lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat PENDIDIKAN KESETARAAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang Orang 8 8 Dinas Pendidikan				calon kepala sekolah						
sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat PENDIDIKAN KESETARAAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang 1 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang			18		·	Orang	292	292	I I	
Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat PENDIDIKAN KESETARAAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang Orang 8 8 Dinas Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan									rendidikan	
19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat PENDIDIKAN KESETARAAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang Orang 8 8 Dinas Pendidikan Pendidi				Swasta) yang memiliki						
lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat PENDIDIKAN KESETARAAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) Orang 0 0 Dinas Pendidikan (Pendidikan Pendidikan Pendidikan			10				1.00	1.00	D.	
sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat PENDIDIKAN KESETARAAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) Orang 0 Dinas Pendidikan (Pendidikan Pendidikan Pendidikan			19			Orang	163	163	I I	
Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat PENDIDIKAN KESETARAAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang Orang 0 0 Dinas Pendidikan (Pendidikan				sekolah menengah						
ijazah SMA/sederajat										
PENDIDIKAN KESETARAAN 1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) (Negeri dan Swasta) (Negeri dan Swasta) yang										
kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang Pendidikan Orang 0 0 Dinas Pendidikan Pendidikan			PE	NDIDIKAN KESETARAA	N					
(Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik Orang 0 0 Dinas Pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang			1		·	Orang	8	8	I I	
2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang 0 0 0 Dinas Pendidikan									Pendidikan	
pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang Pendidikan			2			Orang	0	0	Dinas	
				pendidikan kesetaraan					Pendidikan	





	Urusan	NO	Indikator Kinerja Kunci						
No	Pemerintah		Keluaran	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	an	K	(Output)	(4)	(5)		· ·	(0)	(0)
(1)	(2)		(3) dasar peserta didik dari	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pemerintah Daerah						
		3	Jumlah peserta didik		Orang	0	0	Dinas	
			pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang					Pendidikan	
			menerima pembebasan						
			biaya pendidikan						
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada		Orang	350	350	Dinas Pendidikan	
			satuan pendidikan					Pendidikan	
			kesetaraan (Negeri dan						
		_	Swasta)		0	250	250	ъ.	
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan		Orang	350	350	Dinas Pendidikan	
			kesetaraan (Negeri dan					1 charakan	
			Swasta)						
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan		Orang	202	202	Dinas Pendidikan	
			kesetaraan (Negeri dan					rendidikan	
			Swasta) yang memiliki						
			ijazah diploma empat (D-						
		7	IV) atau sarjana (S1) Jumlah kepala sekolah		Orang	476	476	Dinas	
		,	pada jenjang sekolah		orang	.,,	.,,	Pendidikan	
			dasar yang memiliki						
			ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan						
			surat tanda tamat						
			pendidikan dan pelatihan						
		8	calon kepala sekolah Jumlah kepala sekolah		Omana	19	19	Dinas	
		0	pada satuan pendidikan		Orang	19	19	Pendidikan	
			kesetaraan (Negeri dan						
			Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1						
2	Kesehatan	Ras	ijazan D-1V atau 51 io daya tampung rumah s	akit ruiukan					
_	110001141411		Jumlah RS Rujukan kota	1 u.ju	Unit	19	19	Dinas	
			yang memenuhi sarana,					Kesehatan	
			prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai						
			standar						
			sentase RS Rujukan Tingl	kat kabupaten/kota					
			Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		Unit	31	31	Dinas Kesehatan	
			sentase ibu hamil mendap		sehatan ib	u hamil		Keschatan	
			Jumlah dukungan logistik			40.533	40.533	Dinas	
		2	kesehatan yang tersedia		0	0.074	0.074	Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		Orang	9.974	9.974	Dinas Kesehatan	
			sentase ibu bersalin mend	apatkan pelayanan	persalinan	<u> </u>			
			Jumlah dukungan logistik			38.691	38.691	Dinas	
		2	kesehatan yang tersedia		0	0.074	0.074	Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan		Orang	9.974	9.974	Dinas Kesehatan	
			persalinan sesuai standar					1100011414111	
			ersentase bayi baru lahir r	nendapatkan pelay	anan keseh			Б.	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			38.691	38.691	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan		Orang	9.974	9.974	Dinas	
			untuk pelayanan neonatal					Kesehatan	
		C	esensial sesuai standar	- h-14	<u> </u>				
			<mark>xupan pelayanan kesehata</mark> Jumlah dukungan logistik	n danta sesuai stan	uar 	89.886	89.886	Dinas	
			kesehatan yang tersedia		<u> </u>	23.000		Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan			3.481	3.481	Dinas	
			untuk pelayanan kesehatan balita sesuai					Kesehatan	
			standar						
_					_	_	-		





	T 1	NO	Indikator Kinerja Kunci						
No	Urusan Pemerintah			Rumus	Satuan	Elemen	Capaian	Sumber Data	Keterangan
	an	K	(Output)		~~~~	data	Kinerja		g
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			sentase anak usia pendidil	kan dasar yang men	dapatkan	pelayanan	kesehatan		
			ai standar Jumlah dukungan logistik			238.826	238.826	Dinas	
		1	kesehatan yang tersedia			230.020	230.020	Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan		Orang	17.181	17.181	Dinas	
			untuk pelayanan					Kesehatan	
			kesehatan anak usia						
			pendidikan dasar sesuai standar						
		Por	sentase orang usia 15-59 ta	ahun mandanatkan	ekrinina k	ocohatan c	ecuai		
			idar	тап тепаараткан	SKI IIIIIG K	esciiataii s	Cour		
		1	Jumlah dukungan logistik			449.050	449.050	Dinas	
			kesehatan yang tersedia					Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan		Orang	4.059	4.059	Dinas	
			untuk pelayanan kesehatan sesuai standar					Kesehatan	
		Per	sentase warga negara usia	60 tahun ke atas m	endanatka	n skrining	kesehatan		
			iai standar	o minim ne ums III	uuputka	om ming			
			Jumlah dukungan logistik			43.334	43.334	Dinas	
		_	kesehatan yang tersedia			F 00:	5001	Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan		Orang	5.094	5.094	Dinas Kesehatan	
			kesehatan sesuai standar					Kesenatan	
		Per	sentase penderita hiperten	si yang mendapatk	an pelayar	an keseha	tan sesuai		
		star	ıdar	. , g ,	1				
		1	Jumlah dukungan logistik			124.700	124.700	Dinas	
		_	kesehatan yang tersedia		0	2.650	2.650	Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan		Orang	3.659	3.659	Dinas Kesehatan	
			kesehatan sesuai standar					resenatan	
		Per	sentase penderita DM yan	g mendapatkan pel	ayanan ke	sehatan ses	suai standar		
		1	Jumlah dukungan logistik			71.800	71.800	Dinas	
		2	kesehatan yang tersedia		0	2.650	2.650	Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan		Orang	3.659	3.659	Dinas Kesehatan	
			kesehatan sesuai standar					Resenatan	
			sentase ODGJ berat yang	mendapatkan pelay	anan kese	hatan jiwa	sesuai		
			ıdar						
		1	Jumlah dukungan logistik			890	890	Dinas	
		2.	kesehatan yang tersedia Jumlah SDM kesehatan		Orang	3.664	3.664	Kesehatan Dinas	
		_	untuk pelayanan		Orang	3.004	3.004	Kesehatan	
			kesehatan sesuai standar			<u> </u>			
			sentase orang terduga TB	C mendapatkan pel	ayanan TE				
		1	Jumlah dukungan logistik			7.302	7.302	Dinas	
		2	kesehatan yang tersedia Jumlah SDM kesehatan		Orang	3.659	3.659	Kesehatan Dinas	
			untuk pelayanan		Orang	3.033	3.039	Kesehatan	
			kesehatan sesuai standar						
			sentase orang dengan resil	ko terinfeksi HIV m	endapatka	n pelayan	an deteksi		
			HIV sesuai standar			21 417	21 417	Dia.	
		I	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			31.417	31.417	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan		Orang	3.659	3.659	Dinas	
		-	untuk pelayanan		8			Kesehatan	
			kesehatan sesuai standar						
3			io luas kawasan pemukim		ng terlindu	ıngi oleh			
	Pekerjaan		astruktur pengendalian ba Luas kawasan	anjir	На	Tidak	Tidak	Dinas	
	Umum dan		permukiman rawan banjir		118	Dapat	Dapat Diisi		
	Penataan		di WS kewenangan kota			Diisi	p Diisi	Umum dan	
	Ruang		(ha)					Penataan	
		_	n · · · ·			m: 1 1	m: 1 1	Ruang	
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman		M	Tidak Dapat	Tidak	Dinas Pakariaan	
			yang rawan banjir di WS			Dapat Diisi	Dapat Diisi	Pekerjaan Umum dan	
			kewenangan kota (m)					Penataan	
								Ruang	





	Urusan	NO	Indikator Kinerja Kunci			Elemen	Capaian		
No	Pemerintah an	IK K	Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	data	Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3	Luas kawasan		Ha	Tidak	Tidak	Dinas	
			permukiman sepanjang			Dapat	Dapat Diisi		
			pantai yang rawan abrasi			Diisi		Umum dan	
			erosi dan akresi di WS					Penataan	
		1	kewenangan kota (ha) Panjang pantai di kawasan		M	Tidak	Tidak	Ruang Dinas	
		4	permukiman yg rawan		IVI	Dapat	Dapat Diisi	Pekerjaan	
			abrasi, erosi, akresi di WS			Dapat Diisi	Dapat Diisi	Umum dan	
			kewenangan kota (m)			21101		Penataan	
								Ruang	
		5	Rencana Tata Pengaturan		Ada/Tida	Tidak	Tidak	Dinas	
			air dan tata		k			Pekerjaan	
			pengairan/rencana					Umum dan	
			pengelolaan sumber daya					Penataan	
			air WS Kewenangan kota		A 1- /T: 1-	T: 1-1-	TC 1-1-	Ruang	
		О	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata		Ada/Tida k	Tidak	Tidak	Dinas Pekerjaan	
			pengairan/rencana		K			Umum dan	
			pengelolaan sumber daya					Penataan	
			air kewenangan kota					Ruang	
		7	Data prasarana dan sarana		Jumlah	Tidak	Tidak	Dinas	
			pengaman pantai dan			Dapat	Dapat Diisi	Pekerjaan	
			sungai milik pemerintah			Diisi		Umum dan	
			kota					Penataan	
								Ruang	
			io luas kawasan permukir						
			esi yang terlindungi oleh i a/Kota	nfrastruktur penga	man panta	i di WS Ke	ewenangan		
			Luas kawasan		Ha	Tidak	Tidak	Dinas	
		1	permukiman rawan banjir		114	Dapat	Dapat Diisi	Pekerjaan	
			di WS kewenangan kota			Diisi	1	Umum dan	
			(ha)					Penataan	
								Ruang	
		2	Panjang sungai di		M	Tidak	Tidak	Dinas	
			kawasan permukiman			Dapat	Dapat Diisi	Pekerjaan	
			yang rawan banjir di WS			Diisi		Umum dan	
			kewenangan kota (m)					Penataan Ruang	
		3	Luas kawasan		Ha	Tidak	Tidak	Dinas	
			permukiman sepanjang		114	Dapat	Dapat Diisi		
			pantai yang rawan abrasi			Diisi		Umum dan	
			erosi dan akresi di WS					Penataan	
			kewenangan kota (ha)					Ruang	
		4	Panjang pantai di kawasan		M	Tidak	Tidak	Dinas	
			permukiman yg rawan			Dapat	Dapat Diisi	Pekerjaan	
			abrasi, erosi, akresi di WS			Diisi		Umum dan	
			kewenangan kota (m)					Penataan Ruang	
		5	Rencana Tata Pengaturan		Ada/Tida	Tidak	Tidak	Dinas	
			air dan tata		k k	iluak	riuak	Pekerjaan	
			pengairan/rencana					Umum dan	
			pengelolaan sumber daya					Penataan	
			air WS Kewenangan kota					Ruang	
		6	Rencana Teknis tata		Ada/Tida	Tidak	Tidak	Dinas	
		ĺ	pengaturan air dan tata		k			Pekerjaan	
			pengairan/rencana					Umum dan	
			pengelolaan sumber daya					Penataan	
		7	air kewenangan kota Data prasarana dan sarana		Jumlah	Tidak	Tidak	Ruang Dinas	
		′	pengaman pantai dan		Juliliäll	Dapat	Dapat Diisi		
			sungai milik pemerintah			Dapat Diisi	Duput Diisi	Umum dan	
			kota			D1101		Penataan	
								Ruang	
			io luas daerah irigasi kew		dilayani ole	eh jaringa	n irigasi		
			Persentase panjang	Panjang jaringan	%	Tidak		Dinas	
		ĺ	jaringan irigasi primer	irigasi primer dalam		Dapat		Pekerjaan	
		l	dalam kondisi baik	kondisi baik (m)	1	Diisi		Umum dan	





No	Urusan Pemerintah an	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Panjang jaringan irigasi primer (m)		Tidak Dapat Diisi		Penataan Ruang	
		2	Persentase panjang	Panjang jaringan		Tidak		Dinas	
			jaringan irigasi sekunder	irigasi Sekunder		Dapat		Pekerjaan	
			dalam kondisi baik	dalam kondisi baik (m)		Diisi		Umum dan Penataan	
				Panjang jaringan		Tidak		Ruang	
				irigasi Sekunder		Dapat			
		3	Persentase panjang	(m) Panjang jaringan	%	Diisi Tidak		Dinas	
			jaringan irigasi Tersier	irigasi Tersier		Dapat		Pekerjaan	
			dalam kondisi baik	dalam kondisi baik (m)		Diisi		Umum dan Penataan	
				Panjang jaringan		Tidak		Ruang	
				irigasi Tersier (m)		Dapat		8	
		_				Diisi			
		mel	sentase jumlah rumah tan alui SPAM jaringan perp	ipaan dan bukan ja	kan akses ringan per	terhadap a pipaan terl	ir minum indungi		
			nadap rumah tangga di sel Pemenuhan dokumen	Dokumen RISPAM	Ada/Tida	Ada	Ada	Dinas	
			Rencana Induk Sistem	Kota Tangerang				Perumahan,	
			Penyediaan Air Minum	Tahun 2016 - 2030				Permukiman dan	
			(RISPAM) lintas kota					ean Pertanahan	
		2	Tersusun dan	Dokumen Jakstrada		Ada	Ada	Dinas	
			ditetapkannya Kebijakan	SPAM Kota				Perumahan,	
			Strategis Daerah (JAKSTRADA) kota	Tangerang Tahun 2016 - 2021				Permukiman dan	
			(0.1110.110.1011) 11011					Pertanahan	
		3	Jumlah BUMD dan atau		BUMD/U	1	1	Dinas	
			UPTD kota penyelenggaran SPAM	Benteng	PTD			Perumahan, Permukiman	
			F 7 88					dan	
			T 11''	DE MAE DE	.	4	4	Pertanahan	
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan	PT MAT, PT MOYA, PT BHJ,	Izin	4	4	Dinas Perumahan.	
			Usaha untuk melakukan	dan PT Cilamaya				Permukiman	
			penyelenggaraan SPAM	Subur				dan	
		5	Jumlah kerja sama		Kerjasam	1	1	Pertanahan Dinas	
			penyelenggaran SPAM		a		_	Perumahan,	
			dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah					Permukiman dan	
			lain.					Pertanahan	
			sentase jumlah rumah tan bah domestik	gga yang mempero	leh layanar	n pengolah	an air		
			Jumlah rumah dengan		Rumah	411850	411.850	Dinas	
			akses unit pengolahan					Perumahan, Permukiman	
			setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan					dan	
			dasar menggunakan					Pertanahan	
		_	SPALD S		D 1	11.520	11.520	D'	
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah		Rumah	11.528	11.528	Dinas Perumahan,	
			untuk kegiatan					Permukiman	
			pemenuhan pelayanan					dan	
			dasar menggunakan SPALD-T					Pertanahan	
		3	Jumlah rumah dengan		Rumah	423.378	423.378	Dinas	
			akses unit pengolahan					Perumahan,	
			setempat dan data jumlah rumah dengan akses					Permukiman dan	
			sambungan rumah untuk					Pertanahan	
			kegiatan pemenuhan						
			pelayanan dasar menggunakan SPALD S						
			dan SPALD T						





No	Pemerintah		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Rumah	4.475	4.475	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Rumah	4.475	4.475	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		Rumah	11.528	11.528	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
	_	7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	pengolahan berupa cubluk atau tanki septik	%	411.850	96,98	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
				rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun<25 jiwa/ha		424.633			
		8	Kinerja penyediaan pelayanan IPLT akses aman	rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT rumah di wilayah pengembangan	%	4.475	100,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
				IPLT				1 ertananan	
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T rumah di wilayah pengembangan	%	11.528	100,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
			Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	SPALD T rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	%	382	100,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	jumlah satana pengangkutan yang tersedia jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan	% truk tinja	13	100,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
	-	12	prasarana pengolahan lumpur tinja	kab/kota jumlah kapasits pengolahan lumpur tinja yang tersedia jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota	%	1	100,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		13		jumlah rumah yang memiliki	%	11.528	100,00	Dinas Perumahan,	





No	Urusan Pemerintah an		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kinerja penyediaan	sambuungan rumah				Permukiman	
				yang tersambung dengan IPALD				dan Pertanahan	
			tersamoung ke IPALD	jumlah rumah yang		11.528		Pertananan	
				dilayani @dengan		11.520			
				SPALD-T pada					
				kab/kota					
		14	Kinerja penyediaan jasa	jumlah rumah yang	%	16.385	100,00	Dinas	
			penyedotan lumpur tinja	tangki septiknya sudah disedot				Perumahan, Permukiman	
				jumlah rumah yang		16.385		dan	
				termasuk dalam		10,000		Pertanahan	
				wilayah					
				pengembangan					
		D	* 1	SPADLD-S					
			io kepatuhan IMB kab/ ko Rasio bangunan gedung	Jumlah bangunan	%	12	34,29	Dinas	
		1	(kecuali rumah tinggal	gedung kecuali	70	12	34,27	Perumahan.	
			tunggal dan rumah deret	rumah tinggal				Permukiman	
			sederhana) yang laik	tunggal dan rumah				dan	
			fungsi	deret sederhana				Pertanahan	
				yang laik fungsi yang berlaku					
				Jumlah bangunan		35			
				gedung kecuali					
				rumah tinggal tunggal dan rumah					
				deret sederhana					
		2	Jumlah IMB yang	deret gedernana	Izin	43.338	43.338	Dinas	
			diberikan oleh Pemerintah					Penanaman	
			Kab/kota dalam tahun					Modal dan	
		2	eksisting		Ada/Tida	Ada	A .1.	PTSP Dinas	
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang		Ada/11da k	Aua	Ada	Perumahan.	
			Bangunan/Gedung		K			Permukiman	
								dan	
								Pertanahan	
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang		Ada/Tida k	Tidak	Tidak	Dinas Perumahan.	
			Tim Ahli		K			Permukiman	
			Bangunan/Gedung					dan	
								Pertanahan	
		5	Jumlah bangunan gedung		Bangunan	16	16	Dinas	
			yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk					Perumahan, Permukiman	
			dilindungi dan dilestarikan					dan	
			dimiddings dan diseptarman					Pertanahan	
		6	Jumlah bangunan gedung		Bangunan	0	0	Dinas	
			yang ditetapkan oleh					Perumahan,	
			Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis					Permukiman dan	
			daerah kota					dan Pertanahan	
		7	Jumlah bangunan gedung		Bangunan	3.180	3.180	Dinas	
			negara milik Pemerintah					Perumahan,	
			kota					Permukiman	
								dan	
		R	Jumlah bangunan gedung		Bangunan	3.180	3.180	Pertanahan Dinas	
		U	negara milik pemerintah		Dungunan	5.100	2.100	Perumahan,	
			kota yang					Permukiman	
			dipelihara/dirawat					dan	
		Dec	io kemantapan jalan					Pertanahan	
			Panjang jalan berdasarkan		KM	255,318	255,318	Dinas	
			yang ditetapkan kepala			,	,	Pekerjaan	
			daerah dalam SK jalan					Umum dan	
			kewenangan kota					Penataan	
	l l				<u> </u>			Ruang	





No	Urusan Pemerintah an		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2	Panjang jalan yang		KM	0	0	Dinas	
			dibangun					Pekerjaan	
								Umum dan	
								Penataan	
		3	Panjang jembatan yg		M	0	0	Ruang Dinas	
		3	dibangun		IVI	U	U	Pekerjaan	
			dibungun					Umum dan	
								Penataan	
								Ruang	
		4	Panjang jalan yang		KM	2,94	2,94	Dinas	
			ditingkatkan					Pekerjaan	
								Umum dan	
								Penataan Ruang	
		5	Panjang jembatan yang		M	0	0	Dinas	
		J	diganti/dilebarkan		171	U	O	Pekerjaan	
			8					Umum dan	
								Penataan	
								Ruang	
		6	Panjang jalan yang		KM	2,49	2,49	Dinas	
			direkonstruksi atau					Pekerjaan	
			direhabilitasi					Umum dan	
								Penataan Ruang	
		7	Panjang jembatan yang		M	0	0	Dinas	
		,	direhabilitasi		171	U	O	Pekerjaan	
								Umum dan	
								Penataan	
								Ruang	
		8	Panjang jalan yang		KM	6,86	6,86	Dinas	
			dipelihara					Pekerjaan	
								Umum dan Penataan	
								Ruang	
		9	Panjang jembatan yang		M	990	990	Dinas	
			dipelihara		1,1	,,,	,,,,	Pekerjaan	
			•					Umum dan	
								Penataan	
								Ruang	
			sio tenaga kerja konstruks gan sertifikat pelatihan al		layah kota	yang dibu	ktikan		
			Jumlah Pelatihan Tenaga	(Data Bimtek	Orang	159	159	Dinas	
		1		SMKK 2020)	Oralig	139	139	Perumahan,	
			wilayah kota	SWILL 2020)				Permukiman	
			,					dan	
								Pertanahan	
		2	Jumlah tenaga kerja	(Data Bimtek	Orang	159	159	Dinas	
			operator/teknisi/analis	SMKK 2020)				Perumahan,	
			yang terlatih di wilayah kota					Permukiman dan	
			Kota					Pertanahan	
		3	Jumlah tenaga kerja	Data Bimtek	Orang	149	149	Dinas	
			konstruksi terlatih yang	SMKK 2020	_		-	Perumahan,	
			tersertifikasi ahli di	(LULUS)				Permukiman	
			wilayah kota					dan	
			m 1 ~:					Pertanahan	
		4	Terselenggaranya Sistem		Ada/Tida	Ada	Ada	Dinas	
			Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kota	SIPJAKi)	k			Perumahan, Permukiman	
			yang aktif dengan data					dan	
			termutakhir					Pertanahan	
		5	Tersedianya data dan	Ada (Data RUP	Ada/Tida	Ada	Ada	Dinas	
			informasi potensi pasar	Penyedia Paket				Perumahan,	
				Konstruksi)				Permukiman	
			kota yang bersumber dari					dan	
	l l		APBD kota			<u> </u>		Pertanahan	





	Urusan	NO	Indikator Kinerja Kunci			El	G		
No	Pemerintah an		Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	K	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	. /	6	Tersedianya data dan	,	Ada/Tida	Tidak	Tidak Ada	Dinas	` /
			informasi potensi pasar		k	Ada		Perumahan,	
			jasa konstruksi di wilayah					Permukiman dan	
			kota yang bersumber dari APBN					Pertanahan	
		7	Tersedianya data dan		Ada/Tida	Tidak	Tidak Ada	Dinas	
			informasi potensi pasar		k	Ada		Perumahan,	
			jasa konstruksi di wilayah					Permukiman	
			kota yang bersumber dari					dan	
		8	pendanaan lainnya Tersedianya data dan	Ada (Data RUP	Ada/Tida	Ada	Ada	Pertanahan Dinas	
		O		Penyedia Paket		Ada	Ada	Perumahan,	
			jasa konstruksi sesuai	Konstruksi)				Permukiman	
			kewenangannya yang					dan	
			sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan					Pertanahan	
			usaha jasa konstruksi yang						
			termutakhir secara berkala						
		9	Tersedianya data dan	Ada (Perwal	Ada/Tida	Ada	Ada	Dinas	
			profil OPD sub-urusan	SOTK)	k			Perumahan,	
			jasa konstruksi kota					Permukiman dan	
								Pertanahan	
	ŀ	10	Tersedianya data dan	Ada (Data	Ada/Tida	Ada	Ada	Dinas	
			informasi pelatihan tenaga	SKT+Data Bimtek)	k			Perumahan,	
			operator dan teknisi/analis					Permukiman	
			konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang					dan Pertanahan	
			dilaksanakan sendiri atau					1 Citananan	
			melalui kerjasama dengan						
			Lembaga Pendidikan dan						
			Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh						
			menteri yang membidangi						
			jasa konstruksi, asosiasi						
			profesi, perguruan tinggi						
			dan instansi pemerintah						
		11	lainnya. Tersedianya data dan	Ada (Data	Ada/Tida	Ada	Ada	Dinas	
		11	informasi tenaga kerja	SKT+Data Bimtek)	k	7 IGU	7100	Perumahan,	
			konstruksi yang terlatih di					Permukiman	
			wilayah kota yang					dan	
			dibuktikan dengan sertifikat pelatihan					Pertanahan	
			operator dan teknisi/analis						
		12	Tersedianya data dan		Ada/Tida	Ada	Ada	Dinas	
			informasi tenaga kerja	SKT+Data Bimtek)	k			Perumahan,	
			konstruksi terlatih yang					Permukiman	
			tersertifikasi operator/teknisi/analis di					dan Pertanahan	
			wilayah kab/kota						
	ļ	13	Tersedianya data dan	Ada (Data BUJK)	Ada/Tida	Ada	Ada	Dinas	
			informasi badan usaha		k			Perumahan,	
			yang mendapatkan pembinaan di wilayah					Permukiman dan	
			kota					Pertanahan	
	ľ	14	Tersedianya data dan	Ada (Data Rejap	Ada/Tida	Ada	Ada	Dinas	
			informasi pemenuhan	SIUJK)	k			Perumahan,	
			komitmen permohonan					Permukiman	
			IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui					dan Pertanahan	
	ŀ	15	Tersedianya data dan		Ada/Tida	Tidak	Tidak Ada	Dinas	
			informasi hasil		k	Ada		Perumahan,	
			pengawasan					Permukiman	
			ketidaksesuaian jenis,					dan	
			sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau					Pertanahan	
			kualifikasi usaha dengan						
	ı,							i I	





	Urusan	NO	Indikator Kinerja Kunci			TIL	G .		
No	Pemerintah an		Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya						
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tida k	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tida k	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		18		417 (Data BUJK)	Badan Usaha	417	417	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kota	250 (Data SIUJK)	Badan Usaha	250	250	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota	7269 (Data RUP)	Badan Usaha	7.269	7.269	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
			Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota	417 (Data BUJK)	Badan Usaha	417	417	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	250 (Data SIUJK)	izin	250	250	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
			Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawas an	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Kecelakan Konstruks i	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawas an	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	_





	Urusan	NO	Indikator Kinerja Kunci				~ .		
No	Pemerintah	IK	Keluaran	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	K	(Output)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(0)
4		Pen	yediaan dan rehabilitasi rı					(6)	(9)
	n Rakyat		Jumlah rumah yang		Unit	35.326	35.326	Badan	
	dan		berada pada kawasan					Penanggulang	
	Kawasan Permukim		rawan bencana dan					an Bencana Daerah	
	an	2	rencana penanganannya Jumlah rumah yang		Unit	35.326	35.326	Badan	
		_	terkena bencana alam		Cilit	33.320	33.320	Penanggulang	
								an Bencana	
		_	Y 11 DM YYY 1 Y		0	101.500	101 500	Daerah	
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya		Orang	101.723	101.723	Badan Penanggulang	
			terkena bencana alam					an Bencana	
								Daerah	
		4	Jumlah unit rumah korban		Unit	0	0	Dinas	
			bencana yang direhabilitasi sesuai					Perumahan, Permukiman	
			dengan rencana aksi					dan	
			dengan reneana angr					Pertanahan	
		5	Jumlah unit rumah korban		Unit	0	0	Dinas	
			bencana yang dibangun					Perumahan, Permukiman	
			kembali sesuai dengan rencana aksi					dan	
			Tenedna aksi					Pertanahan	
		6	Jumlah unit rumah korban		Unit	0	0	Dinas	
			bencana yang dibangun					Perumahan,	
			baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi					Permukiman dan	
			dengan rencana aksi					Pertanahan	
		7	Jumlah unit dan lokasi		Unit	0	0	Dinas	
			rumah sewa yang akan					Perumahan,	
			menjadi tempat tinggal					Permukiman	
			sementara korban bencana					dan Pertanahan	
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa		Orang	0	0	Dinas	
			korban bencana yang					Perumahan,	
			terfasilitasi					Permukiman	
								dan Pertanahan	
		9	Jumlah, luasan dan lokasi		Ha	0	0	Dinas	
			pencadangan lahan					Perumahan,	
								Permukiman	
								dan Pertanahan	
		Fas	l ilitasi penyediaan rumah la	avak huni bagi mas	varakat te	rdampak r	elokasi	Fertalialiali	
		pro	gram pemerintah kota	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	,	p1			
		1	Jumlah rumah tangga		RT	0	0	Dinas	
			penerima layanan yang					Perumahan,	
			telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian					Permukiman dan	
			aset properti berdasarkan					Pertanahan	
			rencana pemenuhan SPM						
		2	Jumlah rumah tangga		RT	0	0	Dinas	
			penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan					Perumahan, Permukiman	
			fasilitasi penggantian hak					dan	
			atas tanah dan/atau					Pertanahan	
			bangunan berdasarkan						
		2	rencana pemenuhan SPM		рт	0	0	Dia.	
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan		RT	0	0	Dinas Perumahan,	
			subsidi uang sewa					Permukiman	
			berdasarkan rencana					dan	
		L.	pemenuhan SPM					Pertanahan	
		4	Jumlah rumah tangga		RT	0	0	Dinas	
			penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan					Perumahan, Permukiman	
			penyediaan rumah layak					dan	
			•					Pertanahan	





No	Urusan Pemerintah an			Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM						
		5	Jumlah rumah tangga		RT	0	0	Dinas	
			penerima layanan yang			Ü		Perumahan,	
			belum mendapatkan					Permukiman	
			penyediaan rumah layak					dan	
			huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM					Pertanahan	
		6	Jumlah total luasan (Ha)		На	0,3452	0,3452	Dinas	
			pengadaan tanah			- ,-	- ,	Perumahan,	
								Permukiman	
								dan Pertanahan	
		Per	<u> </u> sentase Luas kawasan kur	l nuh dihawah 10 H:	a vano dita	ngani		Pertananan	
			Jumlah luasan (ha)		Ha	339,87	339,87	Dinas	
			kawasan pemukiman					Perumahan,	
			kumuh < 10 Ha					Permukiman	
								dan Pertanahan	
		2	Jumlah unit peningkatan		Unit	0	0	Dinas	
			kualitas RTLH					Perumahan,	
								Permukiman	
								dan Pertanahan	
		3	Jumlah luasan (ha)		Ha	311,37	311,37	Dinas	
			penanganan infrastrukur		114	311,37	511,57	Perumahan,	
			kawasan kumuh					Permukiman	
								dan	
		Ror	<u> </u> kurangnya jumlah unit R'	 TI H (Rumah Tidal	z I avak Hı	ıni)		Pertanahan	
			Jumlah rumah di kab/kota	TEH (Kuman 11dai	Rumah	424.633	424.633	Dinas	
								Perumahan,	
								Permukiman	
								dan Pertanahan	
		2	Jumlah unit PK RTLH		Rumah	0	0	Dinas	
								Perumahan,	
								Permukiman	
								dan Pertanahan	
		3	Jumlah rumah tidak layak		Rumah	3.066	3.066	Dinas	
			huni		110111011	2.000	2.000	Perumahan,	
								Permukiman	
								dan	
		4	Jumlah rumah yang tidak		Rumah	0	0	Pertanahan Dinas	
		_	dihuni		Kuman	Ü	O	Perumahan,	
								Permukiman	
								dan	
		5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	%	588.566	138,61	Pertanahan Dinas	
)	Rasio fullian dan KK	Jumlah total unit		424.633	130,01	Perumahan,	
				rumah				Permukiman	
								dan	
		6	Jumlah rumah			0	0	Pertanahan Dinas	
			pembangunan baru			U	U	Perumahan,	
			J					Permukiman	
								dan	
		Tree	 nlah perumahan yang sud:	ah dilangkani DCII.	Draceroro	Sarana d	an Litilitae	Pertanahan	
		Um	um)	an unengkapi F3U (, Sarana Q	an Culltas		
			Jumlah perumahan yang		Perumaha	70	70	Dinas	
			terfasilitasi PSU		n			Perumahan,	
								Permukiman dan	
								Pertanahan	





			Indikator Kinerja Kunci			Elemen	Capaian		
No	Pemerintah an	IK K	Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	data	Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air		Rumah	424.633	424.633	Dinas Perumahan,	
			minum					Permukiman	
								dan	
		2	Jumlah unit rumah yang		Rumah	424.633	424.633	Pertanahan Dinas	
		3	terfasilitasi jalan		Kuillali	424.033	424.033	Perumahan.	
			lingkungan					Permukiman	
								dan	
			Y 11 '- 1		D 1	100.070	122 270	Pertanahan	
		4	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi		Rumah	423.378	423.378	Dinas Perumahan,	
			(on site / off site)					Permukiman	
			,					dan	
								Pertanahan	
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Perumaha n	70	70	Dinas Perumahan,	
			terrasimasi KTIVII		11			Permukiman	
								dan	
								Pertanahan	
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Rumah	424.633	424.633	Dinas Perumahan.	
			terrasimasi akses fju					Permukiman	
								dan	
								Pertanahan	
		7	Jumlah pengembang yang		Pengemba	75	75	Dinas	
			tersertifikasi		ng			Perumahan, Permukiman	
								dan	
								Pertanahan	
		8	Jumlah pengembang yang		Pengemba	75	75	Dinas	
			terregistrasi		ng			Perumahan, Permukiman	
								dan	
								Pertanahan	
		9	Jumlah pengembang yang		Pengemba	172	172	Dinas	
			mendapat penyuluhan atau pelatihan		ng			Perumahan, Permukiman	
			peratman					dan	
								Pertanahan	
5			sentase gangguan Trantib	um yang dapat dise		1.210	1.210	G . IDD	
	an Ketertiban	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum		Jumlah	1.318	1.318	Satpol PP	
	Umum dan		dalam Kab/kota yang						
	Perlindung		ditangani						
	an Masyaraka	2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		Orang	174	174	Satpol PP	
	t	3	Jumlah Perda dan Perkada		Perda &	6	6	Satpol PP	
			yang ditegakkan		Perkada		Ü	Surport	
		4	Jumlah Polisi Pamong		Orang	19	19	Satpol PP	
			Praja yang memiliki						
		5	kualitas sebagai PPNS Tersedianya SOP dalam		SOP	15	15	Satpol PP	
			penegakan Perda dan		501	10	10	Surport	
			Perkada serta penanganan						
		6	gangguan trantibum Tersedianya sarana		Jumlah	166	166	Satpol PP	
		U	prasarana minimal		Juillali	100	100	Saiporf	
		Jun	nlah warga negara yang m		informasi	rawan ben			
		1	Persentase penyelesaian	Kemajuan	%	0	0,00	Badan	
			dokumen KRB sampai	pekerjaan dokumen				Penanggulang	
			dengan dinyatakan sah/legal	yang disusun Jumlah satu		1		an Bencana Daerah	
			July 10gui	dokumen KRB		1		Ducium	
				yang lengkap dan					
		2	Dargantaga iumlali	sudah disahkan	0/	101 722	100.00	Dodo-	
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan	Jumlah penduduk di kawasan rawan	%	101.723	100,00	Badan Penanggulang	
ь			II					55414115	





No	Urusan Pemerintah an		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai ienis ancaman				an Bencana Daerah	
				bencana Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana		101.723			
				sesuai jenis ancaman bencana					
			nlah warga negara yang m	emperoleh layanan	pencegaha	an dan kesi	apsiagaan		
			Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	0	0,00	Badan Penanggulang an Bencana	
			uniyatakan san/iegai	Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan		1		Daerah	
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	0	0,00	Badan Penanggulang an Bencana	
				Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan		1		Daerah	
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan Jumlah aparatur	%	3.120	3,07	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	
				dengan warga negara di kawasan rawan bencana				Dacran	
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	%	3.120	3,07	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		101.723		Dacran	
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	%	101.723	100,00	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	
			dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		101.723		Bacran	
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan	%	101.723	100,00	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		101.723			
			nlah warga negara yang m ban bencana		penyelama	atan dan ev	akuasi		
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	%	1	100,00	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	
				Jumlah seluruh penetapan status KLB		1			





No	Urusan Pemerintah an		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		%	1.326	100,00	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	
	-			penetapan status darurat bencana		200			
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Jumlah keseluruhan	%	300	100,00	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	
				petugas dalam penanganan darurat bencana		300			
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari,ditolong dan dievakuasi	%	101.939	100,00	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	
				Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana		101.939			
		Per	sentase pelayanan penyela	ımatan dan evakuas	i korban k	ebakaran			
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas		Layanan	13	13	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	
	-	2	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota Tersedianya pos sektor		Pos	7	7	Badan	
			damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan					Penanggulang an Bencana Daerah	
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Untuk di kantor kecamatan tidak ada. Tetapi terdapat pada 2 pos, 4 UPT, dan 1 markas	Orang	85	85	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Pos	7	7	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Sarpras	186	186	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	
			Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		Orang	300	300	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan		Orang	280	280	Badan Penanggulang	





No	Urusan Pemerintah an		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Penyelamatan atau					an Bencana	
			perangkat daerah yang					Daerah	
			menyelenggarakan sub						
		0	urusan kebakaran Jumlah peningkatan		Vaciatan	2	2	Badan	
		8	kapasitas aparatur		Kegiatan	2	2	Penanggulang	
			pemadam kebakaran					an Bencana	
			pemadam kecakaran					Daerah	
6	Sosial	Per	sentase penyandang disabili	itas terlantar, ana	ak terlantar	, lanjut usi	a terlantar	dan	
		gela	andangan pengemis yang ter						
		1	Jumlah layanan data dan		Layanan	2	2	Dinas Sosial	
			pengaduan yang dimiliki		_		1. 1.00		
		2	Jumlah data penyandang		Data	13.100	13.100	Dinas Sosial	
			disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia						
			terlantar dan gepeng yang						
			masuk dalam data terpadu						
			FM dan OTM						
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat		Tim	1	1	Dinas Sosial	
			yang dibentuk			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
		4	Jumlah penyandang		Orang	13.100	13.100	Dinas Sosial	
			disabilitas terlantar, anak						
			terlantar, lanjut usia						
			terlantar dan gepeng yang						
		5	dijangkau Jumlah kendaraan roda		T T 14	3	3	Dinas Sosial	
		3	empat yang akses khusus		Unit	3	3	Dinas Sosiai	
			layanan kedaruratan yang						
			dimiliki						
		6	Jumlah penyandang		Orang	9.374	9.374	Dinas Sosial	
			disabilitas terlantar, anak						
			terlantar, lanjut usia						
			terlantar dan gepeng yang						
			menerima paket						
			permakanan sesuai standar						
		7	gizi Jumlah rumah		Unit	142	142	Dinas Sosial	
		/	singgah/shelter/tempat		Unit	142	142	Dilias Sosiai	
			tinggal sementara yang						
			dimiliki sesuai standar						
		8	Jumlah penyandang		Orang	36	36	Dinas Sosial	
			disabilitas terlantar, anak						
			terlantar, lanjut usia						
			terlantar dan gepeng yang						
		_	menerima paket sandang					D: 0 : 1	
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak		Orang	68	68	Dinas Sosial	
			terlantar, lanjut usia						
			terlantar dan gepeng yang						
			memanfaatkan alat bantu						
		10	Jumlah alat bantu yang		Alat	3	3	Dinas Sosial	
			tersedia di rumah singgah/						
			shelter						
		11	Jumlah paket perbekalan		Paket	16	16	Dinas Sosial	
		- 10	Kesehatan yang tersedia			20	20	D: 0 : 1	
		12	Jumlah penyandang		Orang	30	30	Dinas Sosial	
			disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia						
			terlantar, lanjut usia						
			memanfaatkan paket						
			perbekalan kesehatan						
		13	Jumlah tenaga Kesehatan		Orang	4	4	Dinas Sosial	
			yang disediakan di rumah						
			singgah						
		14	Jumlah pekerja sosial		Orang	1.709	1.709	Dinas Sosial	
			professional dan/atau TKS						
			dan/atau relawan sosial						
		1	yang disediakan		1				





	Urusan	NO	Indikator Kinerja Kunci			T-1	G		
No	Pemerintah	IK	Keluaran	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	an (2)	K	(Output)	(4)	(5)			(8)	(0)
(1)	(2)	15	Jumlah penyandang	(4)	(5) Orang	(6) 153	(7) 153	(8) Dinas Sosial	(9)
		13	disabilitas terlantar, anak		Orang	133	133	Dinas Bosiai	
			terlantar, lanjut usia						
			terlantar dan gepeng yang						
			mendapatkan bimbingan						
			fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga,						
			masyarakat, Dinas Sosial,						
			Rumah Singgah/Shelter						
			dan/atau pusat						
		1.0	kesejahteraan sosial		77	4	4	D: 0 : 1	
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada		Kegiatan	4	4	Dinas Sosial	
			keluarga dan masyarakat						
		17	Jumlah penyandang		Orang	0	0	Dinas Sosial	
			disabilitas terlantar, anak						
			terlantar, lanjut usia						
			terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk						
			mendapatkan dokumen						
			kependudukan						
		18	Jumlah penyandang		Orang	0	0	Dinas Sosial	
			disabilitas terlantar, anak		_				
			terlantar, lanjut usia						
			terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses						
			layanan pendidikan dan						
			Kesehatan dasar						
		19	Jumlah penyandang		Orang	234	234	Dinas Sosial	
			disabilitas terlantar, anak						
			terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang						
			mendapatkan layanan						
			penelusuran keluarga						
		20	Jumlah penyandang		Orang	234	234	Dinas Sosial	
			disabilitas terlantar, anak						
			terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang						
			direunifikasi dengan						
			keluarga						
		21	Jumlah penyandang		Orang	16	16	Dinas Sosial	
			disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia						
			terlantar dan gepeng yang						
			dirujuk						
		Per	rsentase korban bencana a						
		1	pada saat dan setel	ah tanggap darura				Ding- C 11	
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan		Orang	1.650	1.650	Dinas Sosial	
			makanan						
		2	Jumlah korban bencana		Orang	1.650	1.650	Dinas Sosial	
			yang menerima paket						
		2	sandang		Desir	4	4	Dim G 11	
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi		Penampun gan	4	4	Dinas Sosial	
			yang dimiliki		gan				
		4	Jumlah paket permakanan		Paket	9.374	9.374	Dinas Sosial	
			khusus bagi kelompok						
		_	rentan					D: 0 : 1	
		5	Jumlah korban bencana		Orang	0	0	Dinas Sosial	
			yang menerima pelayanan dukungan psikososial						
		6	Jumlah pekerja sosial		Orang	1.709	1.709	Dinas Sosial	
			professional/tenaga		8				
			kesejahteraan sosial						
			dan/atau relawan sosial						
			yang tersedia						





3. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019

a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2019

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Tahun 2019, bahwa kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Tangerang mendapatkan nilai tertinggi untuk tingkat Provinsi Banten dengan skor 4,0244 (Sangat Tinggi). Adapun untuk hasil EPPD Tingkat Nasional sampai dengan saat ini belum ditetapkan dan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri.

b. Opini Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2019

Pemerintah Kota Tangerang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut yang ke-tiga belas kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pemerintah Kota Tangerang terus membangun akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tata kelola keuangan daerah. Penghargaan Opini WTP juga merupakan hasil kinerja aparatur Pemerintah Kota Tangerang yang mampu menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran, dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan dapat dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut:





Tabel 11 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020 (Unaudited)
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN DAERAH	3.609.275.478.525,00	3.648.663.446.803,00
1.1	Pendapatan asli daerah	1.464.562.583.407,00	1.649.002.723.454,00
1.1.1	Pajak daerah	1.247.328.691.569,00	1.364.323.174.430,00
1.1.2	Retribusi daerah	52.398.045.250,00	62.933.916.205,00
1.1.3	Hasil pengelolaan	14.064.131.363,00	14.064.131.359,00
	kekayaan daerah yang dipisahkan		
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli	150.771.715.225,00	207.681.501.460,00
	daerah yang sah		
1.2	Dana perimbangan	1.400.135.373.059,00	1.355.486.855.234,00
1.2.1	Dana bagi hasil Pajak/Bagi	319.750.909.711,00	284.936.311.782,00
1.4.1	Hasil Bukan Pajak	319.730.909.711,00	204.930.311.702,00
1.2.2	Dana alokasi umum	846.130.955.000,00	843.004.535.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	234.253.508.348,00	227.546.008.452,00
1.3	Lain-lain pendapatan	744.577.522.059,00	644.173.868.115,00
1.0	daerah yang sah	144.077.022.005,00	0++.170.000.110,00
1.3.1	Hibah	261.015.599.936,00	208.141.340000,00
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari	360.365.426.123,00	312.836.032.115,00
	provinsi dan pemerintah daerah lainnya		
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	78.196.496.000,00	78.196.496.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
	pemerintah daerah lainnya		
	Jumlah Pendapatan	3.609.275.478.525,00	3.648.663.446.803,00
2.	BELANJA DAERAH	4.061.484.660.063,09	3.512.296.516.215,88
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.714.061.371.221,05	1.494.701.562.532,00
2.1.1	Belanja pegawai	1.381.216.641.356,05	1.320.382.814.736,00
2.1.2	Belanja bunga	0,00	0,00
2.1.3	Belanja subsidi	4.537.934.000	0,00
2.1.4	Belanja hibah	151.211.680.479,00	88.387.390.475,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada	0,00	0,00
	Provinsi/Kabupaten/Kota		.,
	dan Pemerintah Desa		
2.1.7	Belanja Bantuan	2.738.243.000,00	2.738.243.000,00
	Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota		
0.1.0	dan Pemerintahan Desa	174 256 970 296 00	02 102 114 201 00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	174.356.872.386,00	83.193.114.321,00





NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020 (Unaudited)
1	2	3	4
2.2	Belanja Langsung	2.347.423.288.842,04	2.017.594.953.683,88
2.2.1	Belanja pegawai	59.428.907.770,00	55.523.599.277,00
2.2.2	belanja barang dan jasa	1.796.456.332.725,31	1.683.063.937.951,88
2.2.3	belanja modal	491.538.048.346,73	279.007.416.455,00
	Jumlah Belanja	4.061.484.660.063,09	3.512.296.516.215,88
	Surplus / (Defisit)	-452.209.181.538,09	136.366.930.587,12
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	452.209.181.538,09	452.206.611.820,00
6.1	Penerimaan pembiayaan	452.209.181.538,09	452.206.611.820,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	452.209.181.538,09	452.206.611.820,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran pembiayaan	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
6.2.3	pembayaran pokok utang	0,00	0,00
6.2.7	Pelunasan Biaya Produksi	0,00	0,00
	Pembiayaan netto	452.209.181.538,09	452.206.611.820,00
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0,00	588.573.542.407,12

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2021

5. INOVASI DAERAH

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintaan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Beberapa inovasi daerah yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2020 dan juga diikutsertakan dalam penilaian Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:





^{*}Data Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang TA. 2020 Unaudited

a. CAGEUR JASA (Colaborasi Kunjungan Rumah Integrasi Keluarga Sehat)

Program Cageur Jasa merupakan upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mendatangi rumah warga secara langsung. Cageur Jasa selaras dengan program Kementerian Kesehatan yang berusaha untuk membuat pendekatan atau sosialisasi kesehatan kepada masyarakat.



b. APLIKASI TANGERANG LIVE

Tangerang LIVE merupakan inovasi pelayanan publik melalui aplikasi untuk mengakses seluruh pelayanan OPD dalam satu genggaman. Inovasi berbasis mobile terintegrasi dengan NIK sebagai single sign on ke seluruh pelayanan publik, saat ini telah tersedia 13 kategori pelayanan yang didukung oleh 49 aplikasi berbasis android.







c. APLIKASI PERIZINAN ONLINE TERINTEGRASI 123

Aplikasi Perizinan Online Terintegrasi 123 merupakan inovasi yang dilatarbelakangi oleh tuntutan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik. Didalam aplikasi Perizinan Online terintegrasi 123, tidak hanya terintegrasi sebanyak 123 pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik, tetapi juga meliputi berbagai inovasi lainnya, yaitu terintegrasi SIAK (NIK Pemohon), SIKDA (Login Admin OPD), SISMIOP (NOP), (Keterangan Status Pajak), SIMPAD (Izin Reklame), dan BJB (Pembayaran ATM, Alfamart, Tokopedia).



6. PENUTUP

Demikianlah Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2020, Pemerintah Kota Tangerang ditahun-tahun mendatang akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Tangerang, yaitu Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kota Tangerang.



